

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**MANAJEMEN PENERAPAN PELAYANAN TERPADU DI PPI
MUARA SUNGAI BATURUSA TERHADAP KEPUASAN
NELAYAN KOTA PANGKALPINANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Perikanan**

Disusun Oleh :

SUSY SAPARINA

NIM. 500630092

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRAK
MANAJEMEN PENERAPAN PELAYANAN TERPADU
DI PPI MUARA SUNGAI BATURUSA TERHADAP
KEPUASAAN NELAYAN
KOTA PANGKALPINANG

Susy Saparina

susyhasan80@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

Tujuan penelitian menganalisa peran pelayanan, mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan kinerja pelayanan. Penelitian dilakukan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang dengan pegawai PPI, nelayan dan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan pengamatan, di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang masih belum memadai dalam pelayanan kapal perikanan diantaranya 1). belum lengkap pelayanan kapal perikanan terkait izin; 2) Belum ada fasilitas penunjang pelayanan; 3) Kurangnya SDM perikanan dan masih tumpang tindih tufoksi pegawai PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang dan 4) Dukungan dan koordinasi instansi terkait masih lemah. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan analisis SWOT dan GAP untuk menentukan manajemen penerapan PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang. Manajemen pelayanan yang dianggap sesuai dalam peningkatan yang optimal di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang adalah 1) penyempurnaan pengelola pelabuhan, 2) peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, dan 3) peningkatan pelayanan pelabuhan. Dalam upaya meningkatkan Pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang, maka disarankan untuk 1) Peningkatan fungsi dan Pelayanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 2) Peningkatan kinerja operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan 3) Penelitian lebih lanjut tentang tingkat pelayanan atau standar kinerja keberhasilan PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang.

Kata kunci : Manajemen, Pelayanan, Kepuasan Nelayan, Pangkalan Pendaratan Ikan

ABSTRACT

INTEGRATED SERVICES APPLICATION MANAGEMENT
IN PPI MUARA SUNGAI BATURUSA AGAINST FISHERMAN
PANGKALPINANG

Susy Saparina

susyhasan80@gmail.com

Program Pasca Sarjana

Universitas Terbuka

The research objective is to analyze the role of service, identify service problems and service performance. The study was conducted at the PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang with PPI employees, fishermen and all stakeholders. Based on observations, the PPI Estuary of the Baturusa River in Pangkalpinang is still inadequate in fishing boat services including 1). not yet complete fishing boat services related to permits; 2) There are no service support facilities; 3) Lack of fisheries human resources and still overlapping Tufoksi staff of Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang and 4) Support and coordination of relevant agencies is still weak. The study was carried out using SWOT and GAP analysis to determine the management of the application of the Paturpinang River Baturusa Estuary PPI. Service management that is deemed appropriate in the optimal increase in the Baturusa Estuary Pangkalpinang River PPI is 1) improvement of port managers, 2) improvement of port facilities and infrastructure, and 3) improvement of port services. In an effort to improve services at the Pangkalpinang Muara Baturusa River PPI, it is advisable to 1) Improve functions and services at the Fish Landing Base (PPI), 2) Improve the operational performance of the Fish Landing Base (PPI), and 3) Further research on service levels or standards the performance of the success of the Baturusa River Estuary Pangkalpinang.

Keywords: Management, Service, Fishermen Satisfaction, Fish Landing Base

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PERIKANAN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Manajemen Penerapan Pelayanan Terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa terhadap Kepuasan Nelayan Kota Pangkalpinang** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Agustus 2018

Yang menyatakan



Susy Saparina

NIM 500630092

PROGRAM PASCASARJANA
Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Manajemen Penerapan Pelayanan Terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa terhadap Kepuasan Nelayan Kota Pangkalpinang

Penyusun TAPM : Susy Saparina

NIM : 500630092

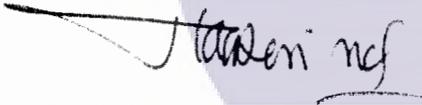
Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

Hari/Tanggal : Jum'at / 07 September 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


 Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si
 NIP. 19670215 199103 1 004


 Dr. Lina Warlina, M.Ed.
 NIP. 19610107 198601 2 001

Penguji Ahli

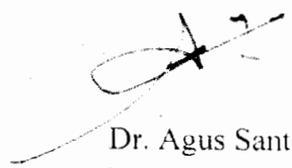

 Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si.
 NIP. 19691106 199702 1 001

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana STEM

Dekan FMIPA-UT


 Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
 NIP.19631111 198803 2 002


 Dr. Agus Santoso, M.Si.
 NIP.19640217 199303 1 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Susy Saparina
 NIM : 500630092
 Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan
 Judul TAPM : Manajemen Penerapan Pelayanan Terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa terhadap Kepuasan Nelayan Kota Pangkalpinang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, pada :

Hari/tanggal : Jum'at / 07 September 2018

Waktu : 08.00 – 09.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~*

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

Penguji Ahli

Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si.

Pembimbing I

Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si

Pembimbing II

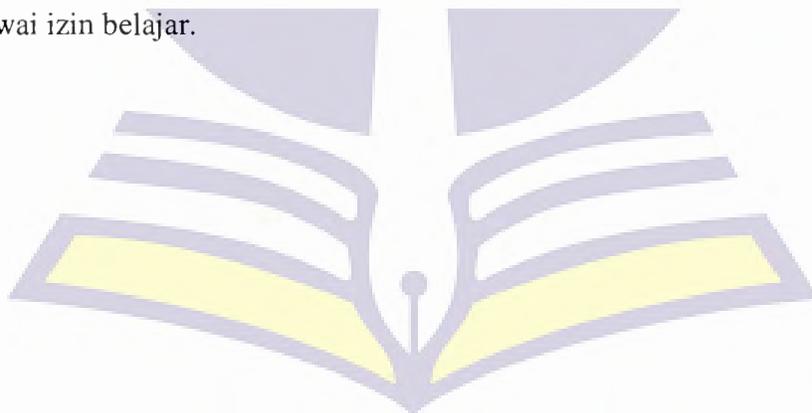
Dr. Lina Warlina, M.Ed

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Muara Meo (Muara Enim) pada tanggal 10 Januari 1980. Penulis adalah anak ke empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Fauziah.

Pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga jenjang Sekolah Menengah Atas diselesaikan di Palembang. Lulus dari Sekolah Dasar tahun 1992, lulus dari Sekolah Menengah Pertama tahun 1995, dan lulus Sekolah Menengah Kejuruan tahun 1998. Selanjutnya menamatkan jenjang Strata-1 Jurusan Budidaya Perikanan pada Universitas Muhammadiyah di Palembang tahun 2002. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan studi sebagai mahasiswa pascasarjana pada Program Studi Manajemen Perikanan dengan biaya sendiri.

Karir pekerjaan dimulai menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2009 menjadi staf bidang Perikanan Tangkap dan ditempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga dengan status sebagai pegawai izin belajar.



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian Tugas Akhir Program Magister(TAPM) dengan judul “Manajemen Penerapan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa terhadap Kepuasan Nelayan Kota Pangkalpinang” dengan baik meskipun sangat jauh dari sempurna.

Usulan penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Perikanan (MPi) pada Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat manajemen Perikanan (MMP) Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

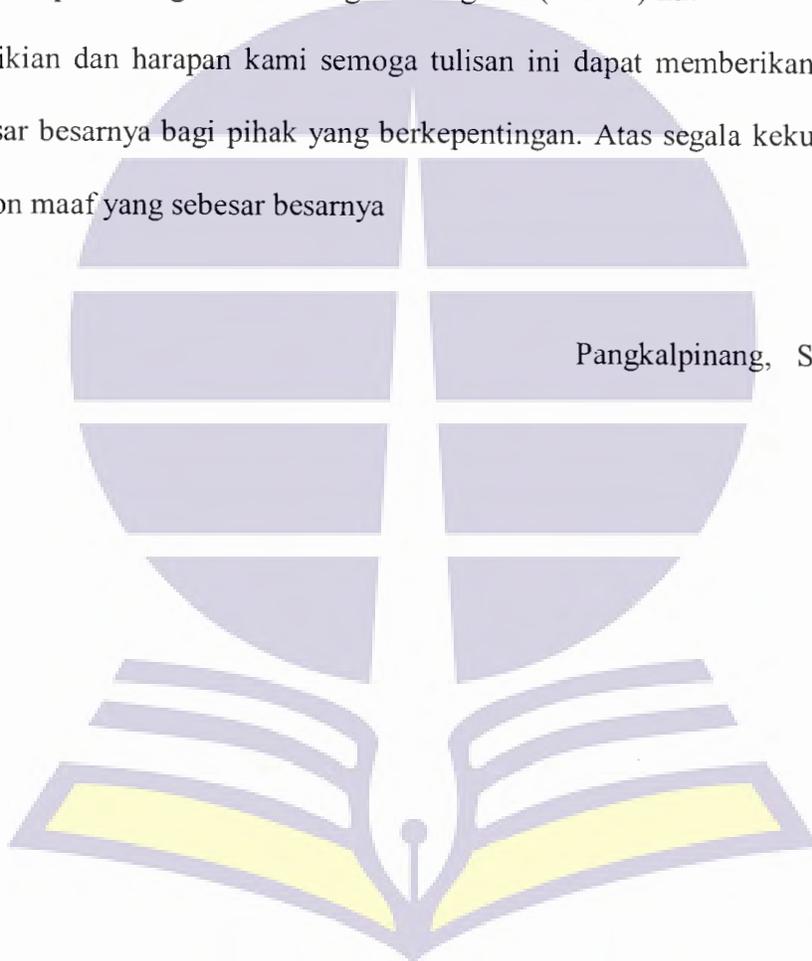
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas ijin yang diberikan kepada penulis menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Dr. Agus Santoso, M.Si selaku Dekan FMIPA Universitas Terbuka atas kesempatan yang diberikan kepada penulis mengikuti perkuliahan di program ini.
3. Ketua Pascasarjana STEM Universitas Terbuka Ibu Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si yang telah memotivasi penulis selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini.
4. Dr.Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si Selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Lina Warlina, M. Ed Selaku Pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga TAPM ini dapat diselesaikan.

5. Kedua Orang Tuaku Ayahnda, Ibunda tersayang dan Suamiku Nurgamal Daryanto, S. Sos dan Bintang Faqih Alvaro putra kami, yang selama ini setia *mensupport* sehingga penulisan ini dapat selesai.
6. Para rekan yang membantu dan mendukung sehingga terselesaikannya laporan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini.

Demikian dan harapan kami semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pihak yang berkepentingan. Atas segala kekuranganya kami mohon maaf yang sebesar besarnya

Pangkalpinang, September 2018

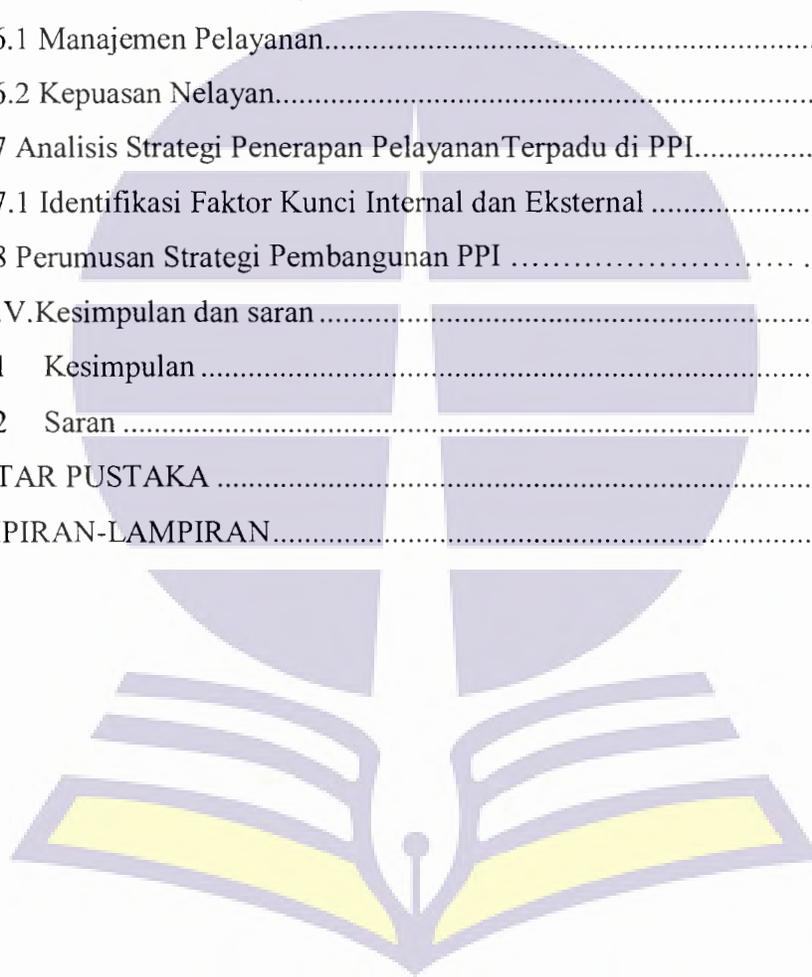
Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB.I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka	7
2.1 Kajian Teoritis	7
2.1.1 Pengertian Pangkalan Pendaratan Ikan	7
2.1.2 Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan	14
2.1.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan.....	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III Metode Penelitian	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Pengumpulan Data dan Informasi	35
3.4 Analisis Data	37
3.4.1 Metode Penentuan Populasi dan Sampel.....	37
BAB IV. Hasil dan pembahasan.....	44

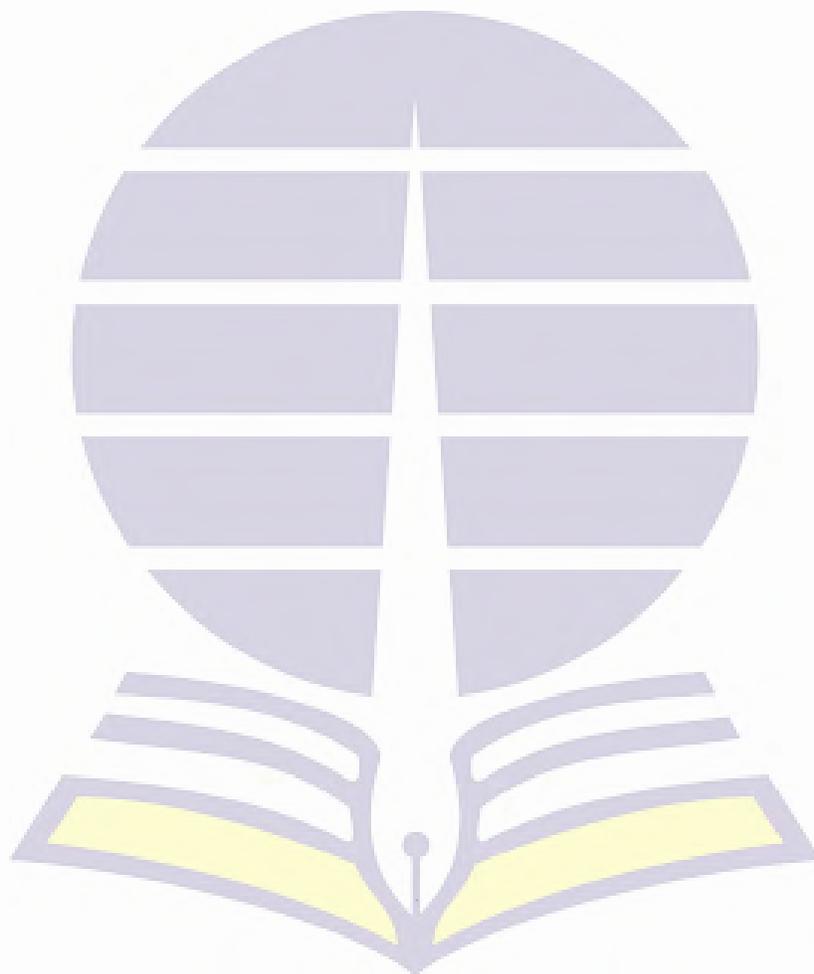
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	44
4.2 Gambaran Perikanan Tangkap	45
4.3 Fungsi dan Peranan	48
4.4 Gambaran Umum Penerapan Pelayanan PPI	52
4.5 Karakteristik Responden	52
4.6 Proses Penerapan Pelayanan PPI.....	55
4.6.1 Manajemen Pelayanan.....	56
4.6.2 Kepuasan Nelayan.....	58
4.7 Analisis Strategi Penerapan Pelayanan Terpadu di PPI.....	60
4.7.1 Identifikasi Faktor Kunci Internal dan Eksternal	60
4.8 Perumusan Strategi Pembangunan PPI	81
BAB.V.Kesimpulan dan saran	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90



DAFTAR TABEL

Judul	Hal
Tabel 1. Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP dan PPI.....	10
Tabel 2. Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal	39
Tabel 3. Matrik <i>Internal Factor Evaluation</i>	40
Tabel 4. Matrik <i>Eksternal Factor Evaluation</i>	41
Tabel 5. Matrik Analisis SWOT	43
Tabel 6. Jumlah Nelayan menurut Kabupaten/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung	45
Tabel 7. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Laut menurut Kategori Kapal/ Perahu	46
Tabel 8. Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap Ikan di Laut menurut Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung, 2016	47
Tabel 9. Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Tangkap di Laut menurut Kategori Besarnya Usaha dan Kabupaten/Kota, 2016	47
Tabel 10. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2005 sampai dengan 2008	49
Tabel 11. Jumlah PNS UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa - Pangkalpinang	51
Tabel 12. Jumlah Pegawai Honorer UPT PPI/TPI	51
Tabel 13. Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 14. Sebaran Responden berdasarkan Instansi	53
Tabel 15. Sebaran Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
Tabel 16. Sebaran Responden berdasarkan Pengalaman Kerja	55
Tabel 17. Analisis GAP Proses Manajemen Penerapan Pelayanan Terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang terhadap Nelayan Kota Pangkalpinang	59
Tabel 18. Faktor Internal dan Eksternal	61
Tabel 19. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)	71
Tabel 20. Hasil Pembobotan	72
Tabel 21. Penentuan Rating	73
Tabel 22. Faktor Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Pelayanan PPI	75

Tabel 23. Faktor Peluang dan Ancaman Penerapan Pelayanan PPI	75
Tabel 24. Rangkaing Alternatif Strategi Penerapan Pelayanan Terpadu di PPI.....	76
Tabel 25. Matriks SWOT dan Alternatif Strategi Penerapan Pelayanan PPI.....	79
Tabel 26. Rencana Strategis Pelayanan PPI.....	83



DAFTAR GAMBAR

Judul.....	Hal
Gambar 1. Lokasi PPI/TPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3
Gambar 2. Tambat Labuh	23
Gambar 3. Jalan Komplek.....	23
Gambar 4. Turap penahan, turap penahan gelombang.....	24
Gambar 5. Alur dan kolam pelabuhan	25
Gambar 6. Gedung TPI dan Peralatannya.....	26
Gambar 7. Tangki BBM, SPDN, Tangki Air Bersih dan Instalasinya	26
Gambar 8. Kantor PPI, Pos Penjagaan bersama di Muara Sungai Baturusa	27
Gambar 9. Lahan Kawasan Industri.....	27
Gambar 10. Fasilitas Fungsional Swasta	28
Gambar 11. Kedai pesisir dan bakul ikan	29
Gambar 12. Plang nama LPPMHP.....	30
Gambar 13. Kerangka Pemikiran Penerapan Pelayanan.....	34
Gambar 14. Lokasi PPI Muara Sungai Baturusa	35



DAFTAR LAMPIRAN

Judul.....	Hal
Lampiran 1.Kuesioner.....	90
Lampiran 2.Pembobotan Faktor Internal	91
Lampiran 3.Pembobotan Faktor Exsternal.....	93
Lampiran 4.Penentuan Rating Faktor Internal	95
Lampiran 5.Penentuan Rating Faktor Eksternal	96
Lampiran 6.Data Produksi	97
Lampiran 7.SK Penetapan Pelabuhan Perikanan	99
Lampiran 8.SPBN	104
Lampiran 9.Aktivitas PPI.....	105
Lampiran 10.Nilai Produksi Perikanan	106
Lampiran 11.Data Produksi Perikanan per Tahun	107
Lampiran 12.Data Produksi Perikanan per Kab/Kota.....	107
Lampiran 13.Data Sentra Produksi Perikanan	108
Lampiran 14.Data Estimasi Potensi SDI.....	109
Lampiran 15.Data Nilai Tukar Nelayan.....	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Salah satu pasal dalam undang - undang perikanan tersebut mengatur pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat penting melihat kondisi geografis Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi Kepulauan. Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunggulan strategis karena tidak terlalu jauh dari jalur perdagangan Singapura - Johor - Riau serta kawasan Kepulauan Natuna.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan strategis baik untuk daerah penangkapan, budidaya dan pemasaran jelas mempertegas bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) yang membawahi 7 (tujuh) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Kabupaten/Kota. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi memiliki bidang-bidang diantaranya bidang perikanan tangkap dimana didalam kegiatan tersebut mencakup berbagai kegiatan diantaranya adanya pengawasan dan pembinaan Pelabuhan Perikanan yang ada di kabupaten/kota Berdasarkan Peraturan Menteri

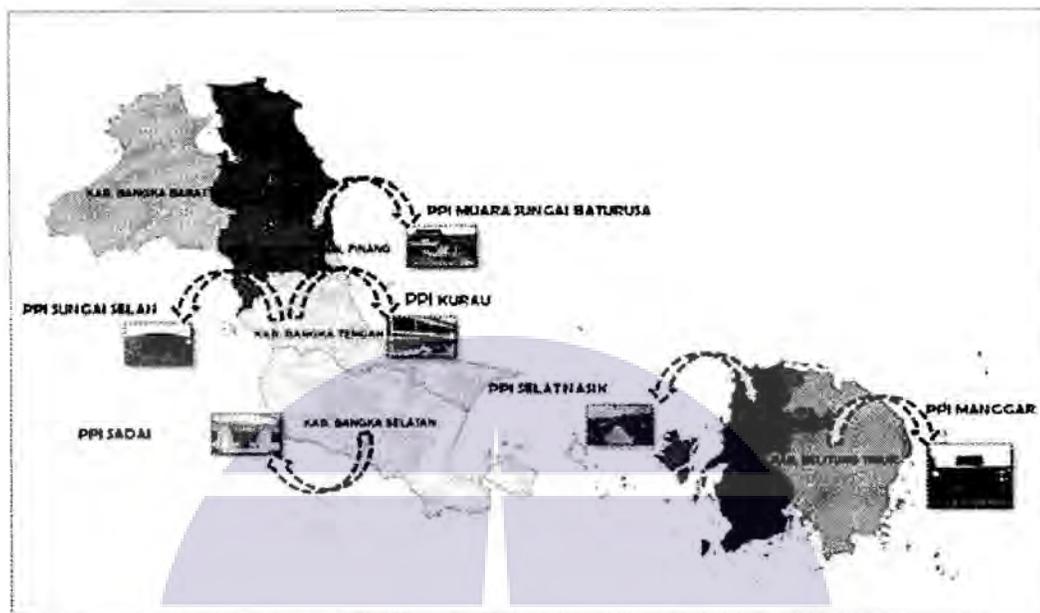
Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, disebutkan bahwa ada kelas pelabuhan perikanan mulai dari Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pangkalan Pendaratan ikan. Provinsi Bangka Belitung memiliki Unit Pelaksana Teknis(UPT) Pusat dan Unit Pelaksana Teknis(UPT) Daerah sebagai berikut.

UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia:

1. Sungailiat • PPN Sungailiat Kab.Bangka
2. Tanjungpandan • PPN Tanjungpandan Kab. Belitung

UPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Kota Pangkalpinang • PPI Sungai Batu Rusa
2. Kab.Bangka : • Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Sungailiat)
3. Kab.Bangka Tengah : • PPI Sungai Selan
• PPI Kurau
4. Kab.Bangka Barat : • PPI Muntok
5. Kab. Bangka Selatan : • PPI Sadai
6. Kab. Belitung : • Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjung Pandan
• PPI Selat Nasik
7. Kab. Belitung Timur : • PPI Gantung
• PPI Manggar



Gambar 1. Lokasi PPI/TPI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, mengacu pada Peraturan Menteri Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, maka Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pangkalpinang Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang termasuk kelas D. Berdasarkan data yang ada PPI dengan rata-rata aktivitas pendaratan hasil tangkapan ± 200 ton/per bulan dan jumlah kapal yang bersandar sebanyak ± 50 unit kapal perhari akan tetapi yang taat melapor hanya ± 20 kapal/perhari.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Batu Rusa terletak di Kelurahan Ketapang dengan titik koordinat BT $106,09'$, $13,51''$ dan LS $2,05'$, $10,22''$. Keberhasilan pengembangan sektor perikanan di Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya, dalam hal ini adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. PPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap secara keseluruhan, juga merupakan *interface* antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran) serta merupakan pusat segala aktifitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti usaha penyediaan

bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan yang tak kalah pentingnya adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

PPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang sebagai suatu daerah lingkungan kerja, diharapkan menjadi pusat kegiatan perikanan dan sekaligus berfungsi sebagai prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah Membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan kemudahan bagi nelayan untuk persiapan operasional, pendaratan hasil, pemasaran, perbaikan serta kemudahan lainnya akan tetapi dalam pelayanan masih belum optimal.

Kepuasan pelanggan merupakan suatu rasa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara harapan awal sebelum pembelian dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Pada saat ini setiap organisasi telah menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama perusahaan dengan memfokuskan perusahaan arah *customer oriented*. Perusahaan harus berusaha meminimalkan ketidakpuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang semakin hari semakin baik. Dan pada saat bersamaan, perusahaan perlu pula memperhatikan konsumen yang merasa tidak puas (Nurlinda, 2013).

Pelayanan yang diberikan pelabuhan perikanan kepada pengguna pelabuhan bukan hanya berupa fasilitas di pelabuhan akan tetapi dibutuhkan pelayanan izin kapal yang melapor baik kedatangan maupun keberangkatan kapal sehingga memudahkan nelayan untuk melakukan aktivitas melaut. Sebagaimana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang seperti tersebut dinilai cukup strategis, karena mempunyai dampak pengganda (*multiplieffect*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, dapat memajukan ekonomi dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan pendapatan asli daerah (PAD). Maka dapat dilihat dari segi tempat yang strategis juga merupakan pendapatan daerah Kota Pangkalpinang.

1.2 Perumusan Masalah

Setiap tahun jumlah nelayan yang memiliki kapal ikan di Kota Pangkalpinang mengalami perubahan sehingga banyak pemilik kapal yang masih belum terdaftar. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan yang pada akhirnya akan menyebabkan *overfishing* dan *overcapacity*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Masih terpisahnya izin lapor kedatangan dan keberangkatan kapal (SPB, STBLKK-D, STBLK-B, HPK dan SLO);
2. Belum ada fasilitas penunjang pelayanan;
3. Kurangnya SDM perikanan dan masih tumpang tindih Tupoksi pegawai PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang dan
4. Dukungan dan koordinasi instansi terkait masih lemah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pelayanan yang optimal, efisien, efektif dan cepat bagi nelayan kota Pangkalpinang. Dalam mencapai tujuan umum tersebut perlu tujuan khusus agar dapat menjawab maksud dan tujuan umum tersebut yaitu:

- a) Menganalisis peran pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa kepada para pemangku kepentingan
- b) Mengidentifikasi permasalahan pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam segi sarana dan prasana PPI Muara Sungai Baturusa.
- c) Menganalisis kinerja pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa.

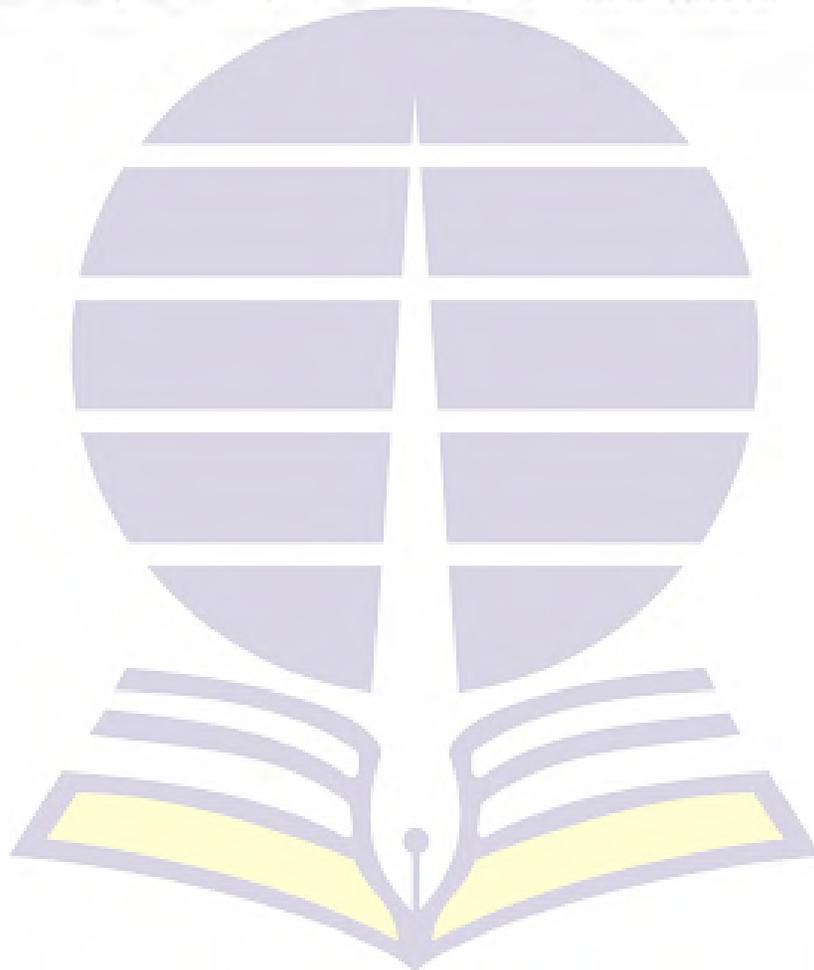
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam:

1. Memberikan sumbang saran pemikiran dalam bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
2. Sebagai bahan masukan dan informasi dalam evaluasi dan bahan pertimbangan pengembangan PPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang khususnya, dan

pemerintah baik ditingkat provinsi maupun kotadalam meningkatkan kinerja pelayanan PPI Baturusa Pangkalpinang;

3. Masukan atau bahan pertimbangan untuk perencanaan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa;
4. Sebagai salah satu syarat dalam meyelesaikan Program Pascasarjana bidang Minat Magister Manajemen Perikanan di Univesitas Terbuka.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan melelangkannya yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun pengolahannya. Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai salah satu unsur prasarana ekonomi, dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil.

Pelayanan di PPI

Pelayanan yang diberikan oleh PPI adalah pelayanan yang berhubungan dengan operasional fasilitas yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna PPI. Secara umum pelayanan di PPI dapat dibedakan kedalam dua kategori, yaitu:

- a. pelayanan yang bersifat langsung kepada nelayan atau pengusaha perikanan untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang mereka butuhkan yang bersifat langsung dalam arti dilakukan secara kasus demi kasus. Pelayanan yang diperlukan meliputi berbagai kegiatan mulai dari sarana produksi, pemasaran hasil sampai dengan distribusi, misalnya kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) seperti bensin dan solar, perbekalan ke laut atau kebutuhan akan perawatan serta perbaikan sarana produksi agar tetap berfungsi secara optimal.
- b. pelayanan yang bersifat tidak langsung yaitu pelayanan kepada masyarakat umum dalam PPI. lebih bersifat massal agar nelayan dan pengusaha perikanan lebih mampu memajukan usahanya dengan berbagai fasilitas yang tersedia.

Tujuan utama pelayanan umum bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam PPI adalah meningkatkan efektif dan efisiensi usaha perikanan. Terdapat beberapa jenis pelayanan langsung kepada nelayan atau pengusaha perikanan untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa. Jenis pelayanan tersebut mencakup (Murdiyanto, 2003):

- a. Pelayanan pembongkaran hasil tangkapan

Pelayanan di dermaga bongkar ialah pelayanan bongkar hasil tangkapan yang diangkut langsung ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menjaga kondisi hasil tangkapan agar tetap higienis dan mencegah penurunan mutu dengan secepat mungkin serta dibutuhkan jarak angkut dari kapal hingga TPI yang diusahakan sependek mungkin. Pelayanan terhadap kapal-kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya diperlukan faktor-faktor yang penting untuk bahan pertimbangan antara lain: a) Menjaga mutu produk yang didaratkan, terdapat suatu kriteria yakni "jangka waktu maksimum yang diperbolehkan untuk menunggu" sebelum pelaksanaan bongkar muatan, dihindari menunggu lebih 1 hari. Pelayanan yang baik untuk membongkar muatan diindikasikan dengan "kecepatan membongkar" dalam satuan "ton ikan per jam"; b) Agar ikan dapat terjual secepat mungkin, semua kapal yang masuk pelabuhan harus dibongkar secepatnya dalam jangka waktu tertentu. Waktu standar efisiensi normal untuk bongkar muat kapal perikanan adalah sekitar 10-12 ton/jam; dan c) Selisih antara waktu tunggu kapal dan waktu tidak digunakannya sarana pembongkaran haruslah sedemikian rupa sehingga tercapai batas optimum ekonomis.

- a. Pembuatan Kartu Nelayan;
- b. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Berlayar;
- c. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLK-D);
- d. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLK-B);
- e. Pelayanan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO);
- f. Pelayanan Logbook Penangkapan Ikan;
- g. Pelayanan Bongkar Muat Hasil Penangkapan Ikan;
- h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Distribusi Ikan;
- i. Pelelangan ikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. Mengangkat hasil tangkapan dari palka sampai ke atas geladak kapal, diperlukan pelayanan penyediaan bantuan tenaga kerja dan peralatan (kotak atau keranjang ikan, derek, *crane*);
- k. Penerbitan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- l. Penarikan retribusi dan pungutan lain yang sah terhadap usaha perikanan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- m. Penerbitan pas kecil, pas besar, dan rambu – rambu keselamatan pelayaran oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- n. Penerbitan Surat Keterangan Mutu, Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan oleh Lembaga Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- o. Pelayanan Pengawasan terhadap Tindak Pidana Perikanan;
- p. Pelayanan Patroli Laut Kapal Pengawas Perikanan;
- q. Pelayanan pengangkutan hasil tangkapan dari kapal ke dermaga dapat dilakukan secara manual, dimana diperlukan pelayanan berupa tenaga kerja, *crane* dermaga, ban berjalan, dan kereta dorong, dan;
- r. Pelayanan perbekalan Pelayanan terhadap kebutuhan perbekalan berupa bahan pokok yang disuplai untuk kapal adalah bahan makanan, air tawar, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan es. Air dapat disalurkan melalui pipa dan tangki penyimpanan, sedangkan untuk es, perlu disediakan mesin penghancur es (*mobile crusher*). Dibutuhkan pula penyediaan alat pemadam kebakaran dengan bahan jenis busa, yang ditempatkan di sekitar sistem penyaluran BBM.

Berdasarkan pengertian manajemen dan pengertian pelayanan diatas manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerepan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplemtasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Dengan Demikian ada tiga hal penting yang berkaitan dengan pelayanan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek-aspek mendasar yang terkandung dalam perencanaan adalah penetapan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan seperti apa yang harus dikerjakan siapa dan bagaimana hal tersebut dikerjakan (Saleh, 2010).

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan

Direktorat Jenderal Perikanan (1994), membagi pelabuhan perikanan berdasarkan fungsi, kapasitas akomodasi, distribusi dan ruang lingkup menjadi:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A).
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B).
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C).
4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Kriteria dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah sebagai berikut.

1. Pangkalan pendaratan ikan merupakan unit pelaksana teknis daerah dan kegiatan perikanan yang dilakukan masih bersifat tradisional.
2. Jumlah Ikan yang didaratkan minimum sampai dengan 5 ton/hari.
3. Dapat menampung kapal sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus.
4. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 M dengan kedalaman kolam minus 2M.
5. Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.

Berikut ini Tabel 1 yang memuat karakteristik Pelabuhan Perikanan di Indonesia berdasarkan kapasitas dan kemampuan pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan.

Tabel. 1 Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI

No	Kriteria Pelabuhan Perikanan	PPS	PPN	PPP	PPI
1	Daerah operasional kapal ikan yang dilayani	Wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2	Fasilitas tambat/labuh kapal	>60 GT	30-60 GT	10-30 GT	3-10 GT
3	Panjang dermaga dan Kedalaman kolam	>300 m dan >3 m	150-300 m dan >3 m	100-150 m dan >2 m	50-100 m dan >2 m

4	Kapasitas menampung Kapal	>6000 GT (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 GT)	>2250 GT (ekivalen dengan 75 buah kapal berukuran 30 GT)	>300 GT (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 GT)	>60 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 GT)
5	Volume ikan yang didaratkan	rata-rata 60 ton/hari	rata-rata 30 ton/hari	-	-
6	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	Tidak
7	Luas lahan	>30 Ha	15-30 Ha	5-15 Ha	2-5 Ha
8	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Ada	Ada/Tidak	Tidak	Tidak
9	Tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan	Ada	Ada	Ada	Tidak

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2010).

a. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)

Pelabuhan perikanan samudera mempunyai tugas melaksanakan tata operasional dan pengelolaan sarana pelabuhan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pelabuhan perikanan samudera mempunyai fungsi:

1. Melakukan tugas tata operasional
2. Melakukan penataan pemanfaatan, perencanaan dan rehabilitasi pembangunan serta pengembangan daerah pelabuhan
3. Melakukan pengelolaan sarana pelabuhan dan pelayanan keperluan nelayan yang tidak ditangani oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera;
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga pelabuhan

Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada

perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan Internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumberdaya ikan sesuai kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan.

Ciri cirinya

- Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 50 Ha
- Melayani kegiatan usaha perikanan di wilayah laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan wilayah perairan Internasional.
- Memiliki fasilitas berlabuh untuk kapal bermesin minimum 60 GT.
- Memiliki minimum panjang dermaga 300 m dan minimum kedalaman kolam 3m.
- Bisa menampung kapal berukuran lebih dari 60 GT sebanyak 100 unit kapal sekaligus
- Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton / hari untuk pemasaran DN maupun LN (Eksport).
- Mempunyai sekurang-kurangnya 1 industri perikanan.
- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan perikanan nusantara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan tata operasional, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pelabuhan perikanan nusantara mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perencanaan, penataan dan pemanfaatan, pembangunan serta pengembangan pelabuhan
2. Penataan operasional pelabuhan, koordinasi instansi terkait, keamanan dan ketertiban
3. Pelayanan kapal perikanan, masyarakat dan industri perikanan di lingkungan pelabuhan
4. Pemeliharaan dan perawatan sarana pelabuhan dan
5. Pengelolaan unsur tata usaha pelabuhan

Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal–kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI, serta mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah ikan yang didaratkan.

Ciri–cirinya:

- Mempunyai cadangan lahan darat seluas 30-40 Ha
- Melayani kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Dapat menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT sebanyak 50 unit kapal sekaligus.
- Memiliki minimum panjang dermaga 150 m dan minimum kedalaman kolam 3m.
- Jumlah ikan yang didaratkan minimum 50 ton / hari untuk pemasaran dalam negeri dan memproduksi ikan berkomoditas ekspor.
- Mempunyai sekurang-kurangnya 1 industri perikanan.
- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan.

c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pelabuhan Perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal–kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai serta mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya.

Ciri–cirinya:

- Mempunyai cadangan lahan darat seluas 10-30 Ha
- Melayani kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Memiliki fasilitas berlabuh bagi kapal-kapal perikanan < 50 GT sebanyak 25 unit kapal sekaligus
- Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 20 ton /hari untuk pemasaran daerah sekitar atau untuk dikumpulkan dan dikirimkan ke pelabuhan perikanan yang lebih besar

- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan

d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan yang berskala lebih kecil dari Pelabuhan Perikanan Pantai ditinjau dari segi kapasitas penanganan jumlah produksi ikan, maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya

Ciri-ciri:

- Melayani kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
- Memiliki fasilitas berlabuh untuk kapal bermesin < 30 GT sejumlah 15 unit.
- Jumlah ikan yang didaratkan minimum sampai dengan 5 ton/hari
- Tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran dan lahan kawasan industri perikanan
- Dekat dengan pemukiman nelayan

2.1.2 Fungsi dan Peranan Pangkalan Pendaratan Ikan

Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat bertambat dan labuh perahu/kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan melelangkannya yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum serta jasa, untuk memperlancar kegiatan usaha perikanan baik penangkapan ikan maupun pengolahannya. Pangkalan Pendaratan Ikan sebagai salah satu unsur prasarana ekonomi, dibangun dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan perikanan, terutama perikanan skala kecil. Sesuai dengan fungsinya, ruang lingkup kegiatan PPI meliputi tiga hal pokok:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi; tambat labuh perahu/kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil meliputi; penanganan hasil tangkapan, pelelangan ikan, pengepakan, penyaluran/distribusi, pengolahan dan pengawetan.
3. Kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat nelayan, meliputi ; penyuluhan dan pelatihan, pengaturan (keamanan, pengawasan dan perizinan),

pengumpulan data statistik perikanan serta pembinaan perkoperasian dan ketrampilan nelayan.

Ditinjau dari fungsinya (Ayodhoya, 1975) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan prasarana penangkapan yang diperuntukkan bagi pelayanan masyarakat nelayan berskala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perikanan, pengembangan wilayah, agribisnis dan agroindustri serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah (Ayodhoya, 1975). Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. (Direktorat Jenderal Perikanan, 1996/1997).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan 1995 (dalam Sulistyani, 2005), bahwa fungsi dari pada pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut.

a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan;

Sebagai sentral kegiatan masyarakat nelayan, Pelabuhan Perikanan diarahkan dapat mengakomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang.

b. Tempat berlabuh kapal perikanan;

Pelabuhan Perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (*landing*) dan tambat / merapat (*mouing*) kapal-kapal perikanan, berlabuh/merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan (*unloading*), memuat perbekalan (*loading*), istirahat (*berthing*), perbaikan apung (*floating repair*) dan naik dock (*docking*). Sehingga sarana atau fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat, *dock/slipway* menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut.

c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan;

Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (*unloading activities*) Pelabuhan Perikanan selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai dermaga (*apron*) yang cukup memadai, untuk menjamin penanganan ikan (*fish handling*) yang baik dan bersih didukung pula oleh sarana/fasilitas sanitasi dan wadah pengangkat ikan.

d. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan;

Pelabuhan Perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, pemasaran/ pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap.

e. Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan;

Prinsip penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, cepat dan dingin (*clean, quick and cold*). Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap Pelabuhan Perikanan harus melengkapi fasilitas-fasilitasnya seperti fasilitas penyimpanan (*cold storage*) dan sarana / fasilitas sanitasi dan higien, yang berada di kawasan industri dalam lingkungan kerja Pelabuhan Perikanan.

f. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan;

Dalam menjalankan fungsi, Pangkalan Pendaratan Ikan dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan (*Fish Market*) untuk menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.

g. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;

Pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat penangkapan sampai kedatangan konsumen. Pelabuhan Perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap selayaknya dilengkapi unit pengawasan mutu hasil perikanan seperti laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP) dan perangkat pendukungnya, agar nelayan dalam melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkontrol mutu produk yang dihasilkan

h. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan bimbingan melalui penyuluhan baik secara teknis penangkapan maupun management usaha yang efektif dan efisien, sebaliknya untuk membuat langkah kebijaksanaan dalam pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumberdaya ikan selain data primer melalui penelitian data sekunder

diperlukan untuk itu, maka untuk kebutuhan tersebut dalam kawasan Pelabuhan Perikanan merupakan tempat terdapat unit kerja yang bertugas melakukan penyuluhan dan pengumpulan data.

i. Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan;

Pelabuhan Perikanan sebagai basis pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan pemeriksaan spesifikasi teknis alat tangkap dan kapal perikanan, ABK, dokumen kapal ikan dan hasil tangkapan. Kegiatan pengawasan dilaut, Pelabuhan Perikanan dapat dilengkapi dengan pos/pangkalan bagi para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan dilaut.

Fungsi pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapannya serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan.

Berdasarkan fungsi itu, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh PPI ini adalah dengan pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas hasil tangkapan dan pendapatan nelayan akan meningkat. Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang dalam operasionalnya adalah:

a. Kondisi kapasitas fasilitas yang ada

Kondisi bangunan rusak terbatasnya fasilitas sarana prasarana yang ada saat ini masih belum menarik minat investor untuk membuka industri perikanan di PPI.

b. Sistem pengelolaan.

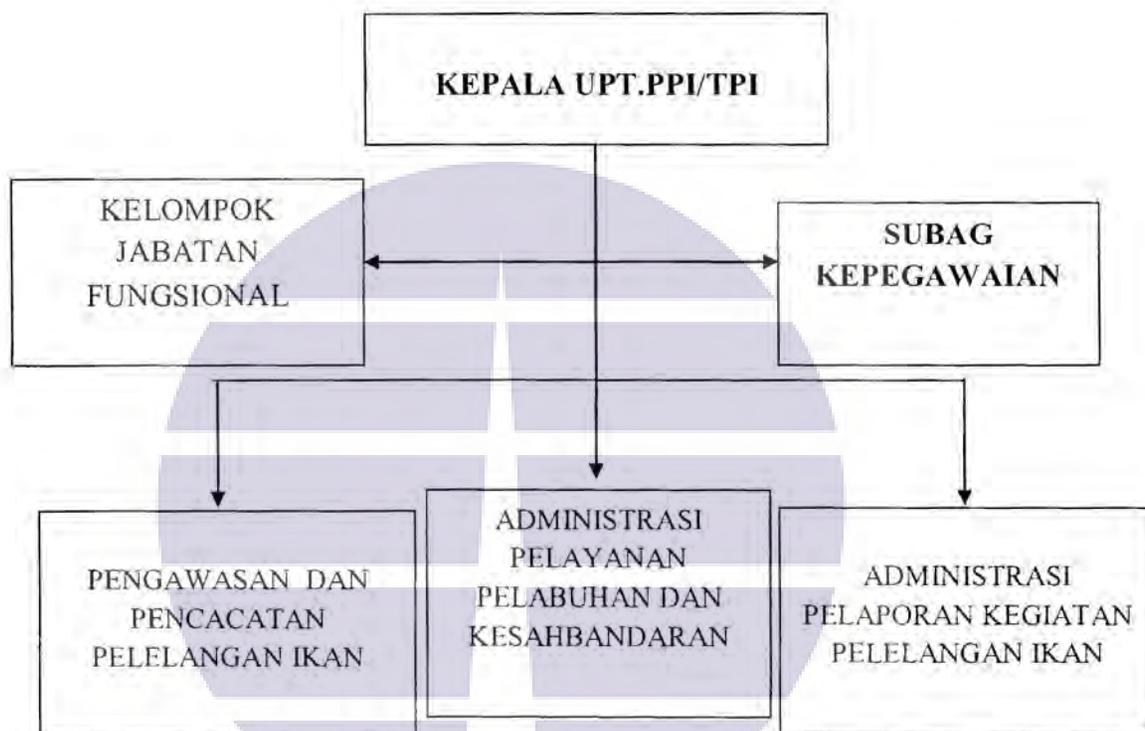
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sekarang berganti nama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

b. Organisasi PPI Muara Sungai Baturusa

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 10 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis daerah yang berbentuk badan dan dinas daerah Kota Pangkalpinang yang berbunyi

- (1) UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - b. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi penataan pedagang ikan maupun nelayan yang akan bertransaksi, pengawasan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, penataan ketertiban dan keamanan pangkalan pendaratan ikan, serta menjaga kebersihan pangkalan pendaratan ikan.
 - c. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PADA UPT. PPI/TPI MUARA SUNGAI
BATURUSA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG**



Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang adalah Pelabuhan Perikanan type D yang merupakan UPT Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang dalam melaksanakan tugas tentang Organisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- 1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan;
- 2) Pelayanan teknis kapal perikanan, dan kesaybandaran pelabuhan perikanan;
- 3) Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pangkalan pendaratan ikan;
- 4) Pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi diwilayahnya untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;

- 6) Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengelolaan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengelolaan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- 8) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;
- 9) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.

d. Kondisi nelayan

Nelayan belum optimal dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Sungai Baturusa karena sikap nelayan yang belum mematuhi tata tertib sebagaimana mestinya.

2.1.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan memiliki berbagai fungsi, yaitu

1. Fasilitas Pokok (*basic facilities*)
2. Fasilitas Fungsional (*functional facilities*)

Fasilitas pokok pelabuhan terdiri atas: fasilitas perlindungan (*protective facilities*), fasilitas tambat (*mooring facilities*) dan fasilitas perairan pelabuhan (*water side facilities*). Fasilitas fungsional terdiri atas berbagai fasilitas untuk melayani berbagai kebutuhan lainnya di areal pelabuhan tersebut seperti bantuan navigasi, layanan transportasi, layanan suplai kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas, tempat penanganan dan pengolahan ikan, fasilitas darat untuk perbaikan jaring, perbengkelan untuk perbaikan dan pemeliharaan kapal, layanan kebutuhan air bersih dan perbekalan melaut dan lain sebagainya (Murdiyanto 2003).

Menurut Lubis (2000), fasilitas fungsional dapat dikelompokkan menjadi empat bagian berdasarkan fungsinya, yaitu:

- a. Untuk penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yang terdiri dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, pabrik es, gudang es, refrigerasi/fasilitas pendingin dan gedung-gedung pemasaran.

- b. Untuk pemeliharaan dan perbaikan armada alat penangkapan ikan, ruang mesin, tempat penjemuran alat penangkapan ikan, bengkel, slipways dan gudang jaring.
- c. Untuk perbekalan yang terdiri dari tangki dan instalasi air minum serta BBM.
- d. Untuk komunikasi yang terdiri dari stasiun jaringan telepon, radio SSB.

Pembangunan dan penyediaan fasilitas prasarana perikanan dan dalam hal ini Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah. Direktorat Jenderal Perikanan dalam menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 41 yang isinya sebagai berikut.

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan.
- (2) Menteri menetapkan:
 - a. rencana induk pelabuhan secara nasional
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan
 - c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan
 - d. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah.

Pangkalan Pendaratan Ikan

PPI Muara Sungai Baturusa telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Peran PPI Muara Sungai Baturusa dalam mendukung usaha perikanan tangkap terdiri dari fungsi pemerintahan dan pengusaha.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang sebagai suatu daerah lingkungan kerja, diharapkan menjadi pusat kegiatan perikanan dan sekaligus berfungsi sebagai prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan kemudahan bagi nelayan untuk

persiapan operasional, pendaratan hasil, pemasaran, perbaikan serta kemudahan lainnya yang terkait dengan:

- 1) Pusat Pengembangan Masyarakat Nelayan;
- 2) Tempat Berlabuh Kapal Perikanan;
- 3) Tempat Pendaratan Ikan Hasil tangkapan;
- 4) Tempat Pelayanan Operasional;
- 5) Pusat Pembinaan dan Penanganan Mutu Hasil Perikanan;
- 6) Pusat Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 7) Pusat Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan Tangkap;
- 8) Tempat Pelaksanaan Pengawasan (MCS) Sumber Daya Ikan.

Dengan tujuan antara lain untuk menunjang proses motorisasi/modernisasi unit penangkapan tradisional secara bertahap dalam rangka memperbaiki usaha perikanan tangkap dalam memanfaatkan perairan secara optimal dan berkesinambungan.

Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang seperti tersebut dinilai cukup strategis, karena mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, dapat memajukan ekonomi dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan pendapatan asli daerah (PAD).

Fasilitas Pokok

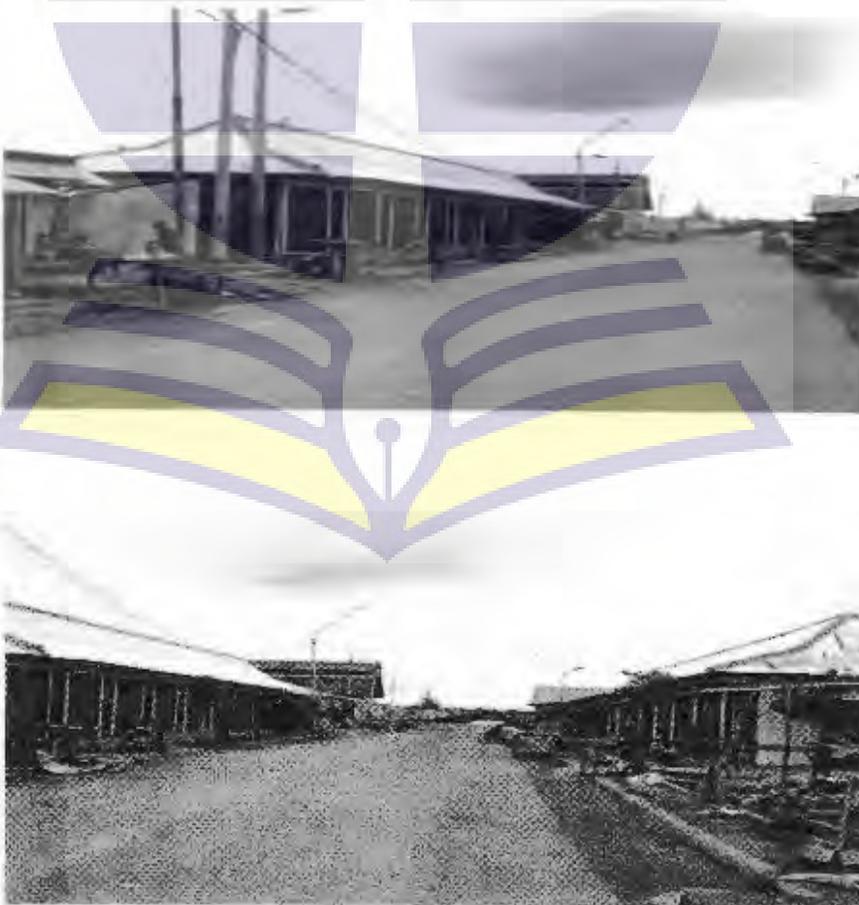
Fasilitas Pokok adalah fasilitas yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan umum, termasuk untuk dapat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat hasil perikanan, yang terdiri dari:

- Fasilitas Tambat : Dermaga



Gambar 2. Tambat Labuh

- Fasilitas Transportasi : Jalan Komplek



Gambar 3. Jalan Komplek

- Fasilitas Pelindung : Turap penahan Tanah, Turap Penahan Gelombang



Gambar 4. Turap penahan Tanah, Turap Penahan Gelombang

- Fasilitas Perairan : Alur dan Kolam Pelabuhan





Gambar 5. Alur dan Kolam Pelabuhan

Fasilitas Fungsional

Fasilitas Fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun diusahakan lebih lanjut oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Indonesia dan perorangan, yang terdiri dari:

- Fasilitas Pemasaran : Gedung TPI dan Pelatarannya





Gambar 6. Gedung TPI dan Pelatarannya

SPBN PPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN) adalah stasiun bahan bakar yang diperuntukan untuk nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Kapasitas SPBN yang berlokasi di PPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang sebesar 20 ton per hari dan dilengkapi dengan tanki pendam.

SPBN ini bertujuan untuk melayani kebutuhan BBM bagi Nelayan dan Pembudidaya ikan skala kecil dengan harga yang sesuai ketetapan pemerintah. Selain itu juga ada jaminan ketersediaan pasokan (mutu dan jumlah) untuk kelangsungan hidup dan usaha produktif nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil.

- Fasilitas : Tanki BBM, SPBN, Tanki Air Bersih dan Instalasinya



Gambar 7. Tanki BBM, SPBN, Tanki Air Bersih dan Instalasinya

- Fasilitas Pengelolaan PPI : Kantor PPI, Pos Penjagaan Bersama di Muara Sungai Baturusa



Gambar 8. Kantor PPI, Pos Penjagaan Bersama di Muara Sungai Baturusa

- Fasilitas lahan untuk kawasan industri : 70 Ha



Gambar 9. Lahan Kawasan Industri

- Fasilitas fungsional yang masih dalam perencanaan/belum tersedia:

1. Fasilitas Pemeliharaan Kapal dan alat tangkap perikanan yang terdiri dari: Bengkel, *Slipway/Dock* kapal dan tempat penjemuran ikan;
2. Fasilitas Pengolahan Limbah;
3. Kios Nelayan, Gudang, Pabrik Es, *Cold Storage*, Peralatan *Processing*, *Crane*;
4. Stasiun Komunikasi dan peralatannya.

- Fasilitas fungsional swasta yang ada di Kota Pangkalpinang :

1. *Cold Storage* dan Gudang SHL, SSPB
2. Pabrik Es
3. *Dock/Slipway*
4. *Processing/Pengolahan*



Gambar 10. Fasilitas fungsional swasta

Fasilitas Penunjang

Fasilitas Penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum, yang terdiri dari:

- Kios Bahan Perbekalan dan alat Perikaaan : Kedai Pesisir Koperasi LEPP-M3
Status Hukum Kedai Pesisir di PPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang merupakan Unit Usaha Otonom (UUO) yang dimiliki oleh Koperasi LEPP-M3 Kota Pangkalpinang yang merupakan Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Pangkalpinang. Unit Usaha Otonom (UJO) adalah unit usaha yang memiliki kewenangan tertentu dalam pengelolaannya.

Tujuan dari Kedai Pesisir yaitu:

- Membantu masyarakat pesisir dalam mendapatkan aneka jenis barang/ kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan melaut bagi nelayan dengan harga yang relatif lebih murah sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Mempersiapkan tenaga-tenaga profesional pengelolaan kedai pesisir;
- Mengembangkan Outlet Kedai Pesisir.

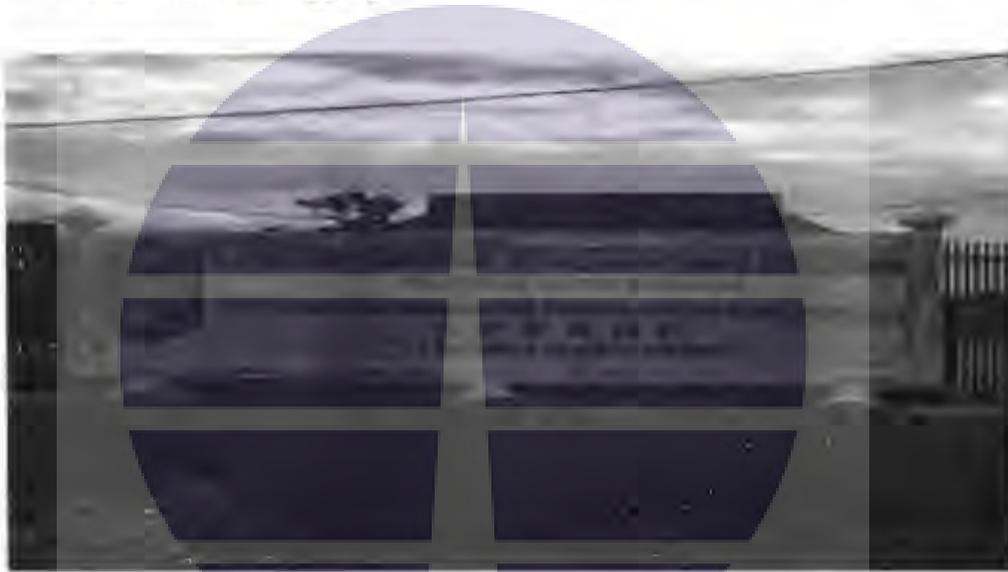
Manfaat dari Kedai Pesisir yaitu:

- Terjaminannya ketersediaan kebutuhan pokok untuk melaut bagi masyarakat pesisir dengan harga terjangkau.



Gambar 11. Kedai pesisir dan bakul ikan

- Fasilitas penunjang lainnya yang berlokasi di luar kompleks PPI Muara Sungai Baturusa, seperti Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) pada PPI Muara Sungai Baturusa serta, Pasar Ikan Higienis (PIH), Pusat Pemasarah Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP), Pasar ikan di Pasir Putih di Kelurahan Pasar Padi dan Pasar Pagi di Kecamatan Gerunggang.



Gambar 12. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) di PPI Muara Sungai Baturusa.

Tempat Pelelangan Ikan

Ikan merupakan komoditi yang mudah busuk. Sesudah diangkat dari kapal, ikan harus segera ditangani secara tepat untuk mempertahankan mutu ikan secara maksimum. Sistem pemasaran menjadi kompleks, Beberapa cara pelayanan untuk mendistribusikan produk perikanan yang dapat dilakukan:

1. Melalui tempat pelelangan ikan di pelabuhan perikanan dan pasar induk di luar kota sebelum akhirnya sampai pada konsumen.
2. Diangkut dengan kapal langsung ke pasar di kota konsumen tanpa melewati tempat pelelangan ikan.
3. Para pengolah membeli ikan untuk bahan mentah di tempat pelelangan.
4. Setelah membeli ikan di pelelangan ikan, tengkulak memasok para konsumen di lingkungan perkotaan seperti restoran, pabrik, rumah sakit, pasar swalayan dan sebagainya.

Hasil tangkapan yang dibongkar dari kapal ikan perlu mendapatkan pelayanan yang memudahkan terlaksananya pekerjaan dalam serangkaian proses seperti sortasi, pencucian, penimbangan, penjualan dan pengepakan di tempat pelelangan ikan (TPI) tersebut. Setelah itu ikan dikirim sebagian untuk konsumsi lokal dalam bentuk segar, sebagian lainnya ke pabrik untuk prosesing dan sisanya ke tempat pembekuan ikan untuk diawetkan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang disediakan di setiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian TPI merupakan bagian dari pengelolaan PPI. Fasilitas lain yang disediakan oleh PPI adalah fasilitas dasar seperti dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran serta fasilitas penunjang seperti gudang, MCK, keamanan dan lain sebagainya.

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan (David, 2011:6). Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini adalah beberapa pengertian manajemen strategi dari beberapa ahli:

- Menurut Wheelen, Hunger, & David (2010:105), strategi adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi.
- Menurut Hariadi (2003:3), strategi manajemen adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi.

- Menurut Mulyadi (2001:40), manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan yang bersifat lintas fungsional, yang digunakan sebagai panduan tindakan bagi fungsi SDM, pemasaran keuangan, produksi, dan lain-lain agar organisasi dapat mencapai tujuannya.

Proses dan Tahapan Manajemen Strategi

David (2011:6) menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

a. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

b. Implementasi Strategi (*Strategy Implemented*)

Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi.

c. Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik; Evaluasi strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam penilaian strategi terdapat tiga aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu: Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, Pengukuran kinerja, dan 3). Pengambilan langkah korektif. Penilaian strategi sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan datang.

2.2. Kerangka Pemikiran

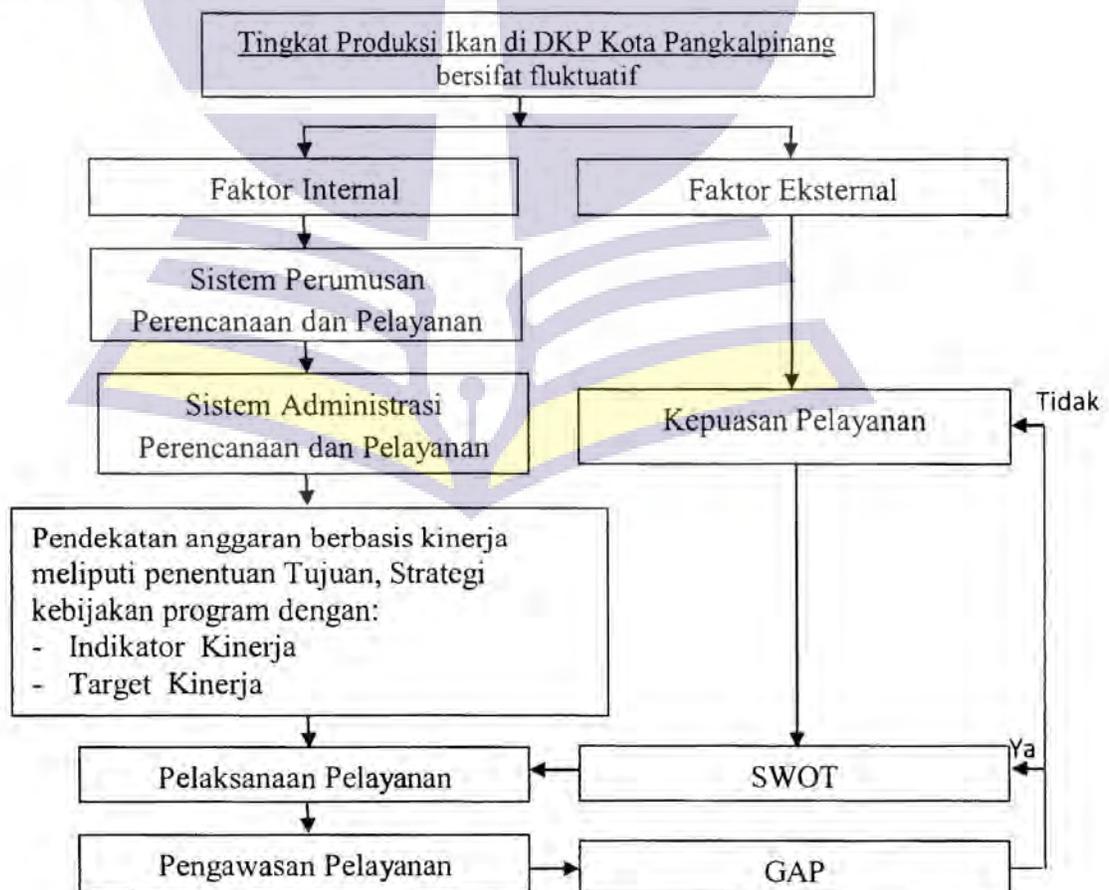
PPI merupakan *interface* antara aktifitas perikanan dilaut (penangkapan) dengan aktifitas di darat (pengolahan dan pemasaran). Peran pangkalan pendaratan ikan sangat jelas dari fungsi dan tujuan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilihat dari data produksi, kapal dan nelayan yang melaporkan kegiatan secara rutin per hari sehingga memudahkan dalam menyampaikan laporan ke pemerintah daerah, pusat dan BPS.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD yang berisikan arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah dapat dijadikan dasar penyusunan Renstra kegiatan yang bersifat operasional. Pembangunan jangka menengah dan pendek dapat tercapai secara tuntas maka perlu didukung perencanaan yang tepat dan penganggaran yang konsisten, sehingga terlihat adanya keterkaitan antara dana dan pembangunan yang tersedia dengan manfaat yang diharapkan.

Kekuatan dan kelemahan dimiliki oleh PPI Muara Sungai Batrurusa dalam implementasi penerapan pelayanan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dirumuskan beberapa alternatif strategi yang bisa menjadi prioritas penguatan sistem manajemen pelayanan. Strategi yang akan diterapkan akan disusun secara bertingkat dalam bentuk kegiatan penguatan perencanaan dan penganggaran dalam penerapan pelayanan.

Salah satu tujuan memberikan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa yaitu memenuhi kebutuhan nelayan dapat berupa jasa maka ada tiga faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu perencanaan, ketepatan dan pelaksanaan serta efektifitas dalam pengawasan pelayanan kegiatan tersebut dan faktor sumber daya manusia selaku pemberi layanan.

Berkaitan dengan konsep pelayanan kepuasan nelayan yang perlu diperhatikan mutu pelayanan dan harapan merujuk ke PPI Muara sungai Baturusa dalam memberi kepuasan terhadap pelanggan sebagai upaya memuaskan nelayan sedangkan harapan ini berasal dari hasil masukan informasi dan saran dari nelayan yang menggunakan pelayanan setiap hari di PPI Muara Sungai Baturusa maka dengan membandingkan mutu pelayanan dengan harapan dapat ditentukan dengan puas atau tidak yang diberikan PPI Muara Sungai Baturusa secara skematis hubungan manajemen pelayanan dan kepuasan nelayan tersaji dalam bentuk kerangka pemikiran Gambar 13.



Gambar 13. Kerangka Pemikiran Penerapan Pelayanan PPI Muara Sungai

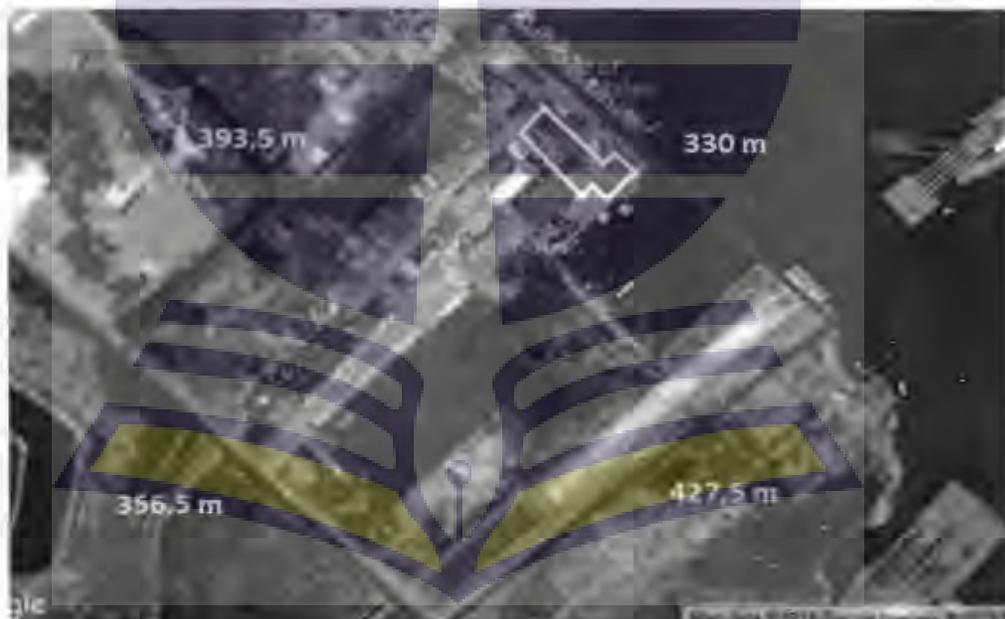
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah dengan survey sedangkan metodenya *deskriptif eksploratif* yang merupakan penelitian non hipotesis, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui aspek-aspek yang mencakup dalam lingkungan penelitian untuk menggambarkan secara tepat kondisi empiris pada waktu sekarang (Sugiyono, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2018, di PPI Muara Sungai Baturusa Jalan Ketapang Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang



Gambar 14. Lokasi PPI Muara Sungai Baturusa

3.3 Pengumpulan Data dan Informasi

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono 2009). Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Sumber data primer di dapat dari studi lapangan yaitu proses pengumpulan informasi, data, fakta secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung dan mencatat atau melakukan pemotretan terhadap peristiwa, kejadian, dan kejadian sistem perumusan dan implementasi perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanggulangan kemiskinan.
 - b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab kepada Pejabat Esselon III dan IV Pelayanan di PPI dan Dinas pangan, Pertanian dan Perikanan. Selanjutnya pewawancara menetapkan sendiri masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman (*interview guide*).
 - c. Kuesioner. Adapun pertanyaan dalam kuesioner tersebut bersifat tertutup dan didistribusikan dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Penyampaian kuesioner tahap pertama untuk mencari tingkat implementasi Penerapan pelayanan terpadu di PPI Muara sungai Baturusa terhadap kepuasan nelayan Kota Pangkalpinang.
 - 2) Penyampaian kuesioner tahap kedua untuk mendapatkan penilaian para ahli, baik dari lingkungan internal dan eksternal institusi yang menjadi pertimbangan utama dalam pelayanan terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa terhadap kepuasan nelayan Kota Pangkalpinang.
 - 3) Penyampaian kuesioner tahap ketiga untuk menentukan strategi utama dan prioritas (*grand strategy*) yang akan dilakukan dalam memperbaiki kondisi pelayanan terpadu di PPI Muara sungai Baturusa terhadap kepuasan nelayan Kota Pangkalpinang.
2. Sumber data sekunder, didapat melalui studi kepustakaan (literatur), yaitu tehnik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan topik diteliti serta bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini termasuk dokumen-dokumen resmi dari penelitian ini seperti dokumen Pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa

Pangkalpinang (Laporan Tahunan, Laporan Produksi, Laporan Kapal) dan sebagainya untuk tahun 2010-2016.

3.4 Analisis Data

3.4.1 Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Metode pengambilan data yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, pengambilan sampel dilakukan secara acak yang mewakilinya. Sampel diambil secara *purposive* dengan tujuan mendapatkan gambaran pengelolaan optimal PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang.

Data yang dikumpulkan pada penelitian Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Sungai Baturusa ini mencakup data primer dan data sekunder.

Metode Pengolahan dan Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Menyusun dan merumuskan strategi dengan menggunakan analisis SWOT dan Gap Analysis. Alat analisis pengambilan data dilakukan melalui tehnik wawancara, kuesioner, observasi lapangan, dan studi dokumen, data yang terkumpul kemudian diberi skor

Analisis SWOT

Rangkuti (2002), menyatakan bahwa analisis perumusan dilakukan dengan menggunakan SWOT (*strenghts-weaknesses-oppurtunities-threats*) yakni analisis yang berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Langkah pertama diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal yang dianggap berpengaruh enerapan pelayanan PPI sehingga nelayan dapat menerima kepuasan dari fungsi PPI.

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal yang dipresentasikan melalui peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kedua faktor tersebut memberikan dampak positif yang berasal dari peluang dan kekuatan, dan negatif yang berasal dari ancaman dan kelemahan.

Dalam analisis SWOT juga digunakan matriks SWOT (Rangkuti, 2002). Matriks tersebut dapat menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan alternatif strategis sebagai berikut : Strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT.

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal teridentifikasi, kemudian disusun sebuah kuesioner sebagai sarana untuk mendapatkan penilaian dari informan terhadap faktor-faktor yang telah dirumuskan. Setelah kuisisioner selesai disusun, maka tahap berikutnya adalah penentuan informan yang akan mengisi kuesioner tersebut. Penentuan responden/informan dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dilakukan pendekatan analisis SWOT dengan interaksi matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal sebagai berikut.

Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE Matriks)

Evaluasi faktor internal (IFE) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal dalam Penerapan Pelayanan Terpadu PPI Muara Ssungai Baturusa terhadap Kepuasan Nelayan Kota Pangkalpinang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. Matriks IFE dikembangkan dalam empat tahap, yaitu:

1. Menuliskan daftar faktor internal yang diidentifikasi dalam proses audit internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan. Menggunakan 10-20 faktor internal terpenting. sespesifik mungkin menggunakan presentase, rasio, dan angka pembandingan.
2. Memberikan bobot masing-masing. Pemberian bobot ini berdasarkan pengaruh faktor-faktor internal tersebut terhadap posisi strategis unit yang dianalisis dalam suatu daerah tertentu. Jumlah bobot yang diberikan harus sama dengan satu.

Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan identifikasi faktor internal kepada *stakeholder* dengan menggunakan metode *paired comparison* (Kinnear dan Taylor 1991) seperti yang disajikan pada Tabel 2. Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot di setiap faktor-faktor internal dan eksternal. Skala yang digunakan adalah:

- 1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal
- 2 = Jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertikal
- 2 = Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertical

Tabel 2. Penilaian bobot faktor strategis internal

Faktor Strategis Internal		A	B	C	D	Total	Bobot
A	■							
B		■						
C			■					
D				■				
.....					■			
Total								

Sumber: Kinnear dan Taylor (1991)

Menurut Kinnear dan Taylor (1991), rumus : $\alpha_i = \frac{x^i}{\sum_{i=1}^n x^i}$

Dimana :

α_i = bobot variabel ke- i n = jumlah data

X_i = nilai variabel x ke- i $i = 1, 2, 3, \dots, n$

3. Penentuan rating atau peringkat oleh para pakar dilakukan terhadap variabel-variabel. Dalam mengukur masing-masing variabel terhadap kondisi wilayah digunakan skala 1, 2, 3, dan 4 terhadap masing-masing faktor strategis. Skala nilai rating atau peringkat untuk matriks IFE adalah:

- Peringkat = 1, jika faktor strategis tersebut menjadi kelemahan utama.
- Peringkat = 2, jika faktor strategis tersebut menjadi kelemahan Minor.
- Peringkat = 3, jika faktor strategis tersebut menjadi kekuatan minor.
- Peringkat = 4, jika faktor strategis tersebut menjadi kekuatan utama.

4. Hasil dari pembobotan (tahap 2) dikalikan dengan peringkat (rating) pada setiap faktor sehingga akan didapatkan nilai tertimbang seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks *Internal Factor Evaluation*

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
<i>Kekuatan (Strengths)</i>				
1			
2			
<i>Kelemahan (Weaknesses)</i>				
1			
2			
Total				

Sumber: David (2002)

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matriks)

Evaluasi faktor eksternal dilakukan untuk mengevaluasi berbagai faktor eksternal yang berada diluar kendali PPI Muara Sungai Baturusa dalam Penerapan Pelayanan Terpadu terhadap kepuasan nelayan kota . Hasil analisis eksternal digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang ada serta seberapa baik strategi yang telah dilakukan selama ini. Matriks EFE dapat dibuat melalui beberapa tahap antara lain:

1. Buat daftar faktor eksternal yang diidentifikasi dalam perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan eksternal dan dibagi menjadi peluang dan ancaman. Usahakan sespesifik mungkin menggunakan presentase, rasio, dan angka pembandingan bila memungkinkan.
2. Berikan bobot masing-masing. Pemberian bobot ini berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis unit yang dianalisis dalam suatu daerah tertentu. Jumlah bobot yang diberikan harus sama dengan satu.

Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan identifikasi faktor eksternal kepada stakeholder dengan menggunakan metode *paired comparison* (Kinneer dan Taylor 1991) seperti yang telah dijelaskan pada matriks IFE sebelumnya.

3. Penentuan rating oleh para informan yang dianggap ahli dilakukan terhadap variabel-variabel. Dalam mengukur masing-masing variabel terhadap kondisi perencanaan dan penganggaran dalam penanggulangan kemiskinan digunakan skala 1, 2, 3, dan 4 terhadap masing-masing faktor strategis. Skala nilai rating untuk matriks EFE adalah :
- Peringkat = 1, berpengaruh lemah
 - Peringkat = 2, berpengaruh agak lemah
 - Peringkat = 3, berpengaruh agak kuat
 - Peringkat = 4, berpengaruh sangat kuat

Tabel 4. Matriks *Eksternal Factor Evaluation*

	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
<i>Peluang (Opportunities)</i>				
1			
2			
3			
<i>Ancaman (Threats)</i>				
1			
2			
3			
Total				

Sumber : David (2002)

4. Hasil dari pembobotan (tahap 2) dikalikan dengan peringkat pada setiap faktor akan didapatkan nilai tertimbang.

Setelah diperoleh hasil pembobotan IFE-EFE selanjutnya akan dilakukan interaksi kombinasi dari strategi yang meliputi kombinasi internal eksternal menggunakan Matriks SWOT, yang terdiri dari:

- 1) Strategi SO (*Strenghts Opportunities Strategy*), yaitu strategi yang digunakan untuk mendapat keuntungan dari peluang yang ada di lingkungan eksternal.
- 2) Strategi WO (*Weaknesses Opportunities Strategy*), yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar.
- 3) Strategi ST (*Strenghts Treaths Strategy*), yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.
- 4) Strategi WT (*Weaknesses Threats Strategy*), yaitu strategi yang digunakan dengan memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.

Penyajian yang sistematis dari matriks SWOT terdapat pada Tabel 5 Matriks SWOT terdiri atas sembilan sel. Ada empat sel faktor kunci, empat sel strategi dan satu sel yang dibiarkan kosong (sel pada kiri atas). Empat sel strategi dapat dikembangkan setelah menyelesaikan empat sel faktor kunci utama (S, W, O, T). Terdapat delapan langkah dalam membuat matriks SWOT yaitu:

- a. Tuliskan peluang eksternal kunci organisasi.
- b. Tuliskan ancaman eksternal kunci organisasi.
- c. Tuliskan kekuatan internal kunci organisasi.
- d. Tuliskan kelemahan internal kunci organisasi.
- e. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasil strategi SO dalam sel yang ditentukan.
- f. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasil strategi WO dalam sel yang ditentukan.
- g. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasil strategi ST dalam sel yang ditentukan.

- h. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasil strategi WT dalam sel yang ditentukankan

Tabel 5. Matriks analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Enternal	Kekuatan (S) Identifikasi Kekuatan	Kelemahan (W) Identifikasi Kelemahan
	Peluang (O) Tentukan faktor peluang eksternal	Ancaman (T) Tentukan faktor ancaman eksternal
	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan
	Peluang Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Peluang Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Sumber: Rangkuti (2014)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang terletak pada posisi BT $106^{\circ},4',00$ sampai dengan $106^{\circ},7',00$ " Bujur Timur dan garis $2^{\circ},4',00$ sampai dengan $2^{\circ},10',00$ " Lintang Selatan. Berdasarkan letak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Batu Rusa terletak di Kelurahan Ketapang Pangkalpinang dengan titik koordinat BT $106,09'$, $13,51''$ dan LS $2,05',10.22''$, Pelabuhan Perikanan Tipe D yang merupakan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

Secara geografis Kota Pangkalpinang terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu berada ditengah – tengah Pulau Bangka dan dekat dengan Pulau Sumatera, Jawa (Jakarta) dan Kalimantan bahkan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Disamping itu juga Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota Provinsi yang mempunyai fungsi pengembangan, salah satunya pusat pemasaran ikan, yang masih sangat besar potensinya untuk wilayah penangkapan ikan/sumber daya ikan yang sangat baik.

Sektor Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang memiliki potensi karena memiliki wilayah penangkapan ikan/sumberdaya ikan yang sangat baik. Salah satu keberhasilan pengembangan sektor perikanan di Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap secara keseluruhan, juga merupakan *interface* antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan didarat (pengolahan dan pemasaran) serta merupakan pusat segala aktifitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti usaha penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan yang tak kalah pentingnya adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

4.2 Gambaran Perikanan Tangkap

1. Nelayan Perikanan Tangkap

Jumlah nelayan aktif di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang sempat mengalami penurunan, yang diprediksi karena sulitnya kehidupan dari sektor usaha penangkapan ikan.

Tabel 6. Jumlah Nelayan menurut Kabupaten/Kota di Prov. Kep Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan Utama	Nelayan Sambilan Tambahan	Jumlah
Kabupaten/Regency				
Kab. Bangka	4.481	3.116	1.305	8.902
Kab. Belitung	4.701	3.094	1.295	9.090
Kab. Bangka Barat	3.869	3.100	1.298	8.267
Kab. Bangka Tengah	3.064	2.455	1.028	6.547
Kab. Bangka Selatan	3.649	2.924	1.224	7.797
Kab. Belitung Timur	1.718	1.377	576	3.671
Kota/Municipality				
Kota Pangkal Pinang	1.052	843	353	2.248
2016	22.534	16.909	7.079	46.522
2015	19.530	11.820	4.948	36.298
2014	26.688	6.369	1.151	34.208
2013	31.066	7.119	1.214	39.399
2012	30.482	7.557	1.520	39.559

2. Kapal Perikanan

Kapal milik nelayan yang terdaftar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perahu/kapal dengan kategori perahu/kapal penangkap ikan.

Tabel 7. *Number of marine fishing boats by size of fishing boats and Regency/Tow*

Kabupaten/Kota	Perahu tanpa motor	Motor tempel	Kapal motor	Jumlah Total
Kabupaten/Regency				
Kab. Bangka	4	953	1.128	2.085
Kab. Belitung	-	180	1.340	1.520
Kab. Bangka Barat	255	1.296	1.031	2.582
Kab. Bangka Tengah	-	876	891	1.767
Kab. Bangka Selatan	105	254	1.249	1.608
Kab. Belitung Timur	18	69	684	771
Kota/Municipality				
Kota Pangkal Pinang	36	248	343	627
2016	418	3.876	6.666	10.960
2015	977	4.275	4.056	9.308
2014	1.421	3.928	9.756	15.105
2013	1.740	3.858	11.534	17.132
2012	1.828	3.680	11.230	16.738

3. Produksi Perikanan Tangkap

Perkembangan sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan serta menambah pendapatan dan memberi kesejahteraan nelayan

Tabel 8. Produksi dan Nilai perikanan tangkap di laut menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Production and Value of marine fisheries by Regency/Town in Kepulauan Bangka Belitung Province, 2016

Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)	Nilai Tangkapan (Rp.1000)
Kab. Bangka	10.575,30	225.469.380
Kab. Belitung	67.189,20	875.574.159
Kab. Bangka Barat	12.960,10	239.308.723
Kab. Bangka Tengah	22.988,10	505.415.259
Kab. Bangka Selatan	41.309,60	633.568.570
Kab. Belitung Timur	39.593,20	1.913.544.882
Kota/Municipality		
Kota Pangkal Pinang	2.088,50	61.209.914
2016	196.704,00	4.454.090.886,40
2015*	139.632,96	3.671.033.785,53
2014	203.284,40	4.478.197.305,48
2013	199.404,33	3.846.850.739,50
2012	202.565,20	3.526.810.457,50

4. Rumah Tangga Nelayan

Jumlah rumah tangga/perusahaan nelayan merupakan usaha penangkapan ikan untuk menambah pendapatan dan memberi kesejahteraan nelayan.

Tabel 9. Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan tangkap di laut menurut kategori besarnya usaha dan Kabupaten/Kota, 2016

Number of Marine capture fisheries establishment by size of fisheries management and Regency/Town, 2016

Kabupaten/Kota	Tanpa Perahu	Perahu tanpa motor	Motor tempel	Kapal motor	Rumah Tangga Perikanan
Kabupaten/Regency					
Kab. Bangka	-	4	953	113	1.070

Kab. Belitung	-	-	195	1.023	1.218
Kab. Bangka Barat	1 027	255	1.296	1.018	3.596
Kab. Bangka Tengah	-	-	876	890	1.766
Kab. Bangka Selatan	386	105	254	1.249	1.994
Kab. Belitung Timur	235	123	76	73	507
Kota/Municipality					
Kota Pangkal Pinang	107	36	247	343	733
2016	1.755	523	3.897	4.709	10.884
2015	357	975	3.212	4.050	8.594
2014	2.531	1421	3.809	9.543	17.304
2013	2.407	1.670	3.837	9.888	17.802
2012	2.515	1.731	3.659	9.582	17.487

4.3 Fungsi dan Peranan

Pembangunan PPI dimulai dari tahun 1999 s.d 2000 dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya beroperasi pada tahun 2007. Untuk pembangunan dan pengelolaan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang yang merupakan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sampai sekarang pengelolaan dan pengembangan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

Sarana Prasarana PPI

1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang suatu daerah lingkungan kerja, diharapkan menjadi pusat kegiatan perikanan dan sekaligus berfungsi sebagai prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan kemudahan bagi nelayan untuk persiapan operasional,

pendaratan hasil, pemasaran, perbaikan serta kemudahan lainnya yang terkait dengan Pusat Pengembangan Masyarakat Nelayan;

2. Tempat Berlabuh Kapal Perikanan;
3. Tempat Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan;
4. Tempat Pelayanan Operasional;
5. Pusat Pembinaan dan Penanganan Mutu Hasil Perikanan;
6. Pusat Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7. Pusat Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan Tangkap;
8. Tempat Pelaksanaan Pengawasan (MCS) sumberdaya ikan.

Dengan tujuan antara lain untuk menunjang proses motorisasi/modernisasi unit penangkapan tradisional secara bertahap dalam rangka memperbaiki usaha perikanan tangkap dalam memanfaatkan perairan secara optimal dan berkesinambungan. Fungsi PPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang tersebut dinilai cukup strategis, karena mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, dapat memajukan ekonomi dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan pendapatan asli daerah (PAD). Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sudah menganggarkan dari tahun 2005 untuk pembangunan agar PPI dapat berjalan sesuai dengan fungsinya data dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2005 s.d 2008

No.	Nama Sarana dan Prasarana Dan Fasilitas Yang Dibangun	Alamat Lokasi	Tahun Pembangunan	Sumber Dana	Nilai Anggaran	Kondisi Eksisting	Ket
1.	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang : - Lanjutan Pembangunan Kolam Pelabuhan - Pemb. Tempat Pelelangan - Pemagaran - Pemecah Gelombang (Break	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa	2005	DAK dan APBD	1.131.900.000	Baik dan Berfungsi	

	Water)						
2.	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang : - Pembangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan - Penimbunan Cor Pelataran - Pagar dan Ground Tank Air Bersih - Draynase, dll	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa	2008	DAK dan APBD	3.015.191.000	Baik dan Berfungsi	
3.	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang : - Kegiatan Land Clering dan Penimbunan - Kegiatan Land Clering dan Penimbunan - Kegiatan Land Clering dan Penimbunan	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa	2009	DAK dan APBD	1.283.350.000	Baik dan Berfungsi	
			2010	DAK dan APBD	898.728.000	Baik dan Berfungsi	
			2011	DAK dan APBD	1.050.050.000	Baik dan Berfungsi	
4.	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang : - Pembangunan Gudang/Kios untuk Pedagang Ikan	UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa	2010	DAK dan APBD	318.733.000	Baik dan Berfungsi	
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN UPT PPI/TPI MURA SUNGAI BATURUSA					Rp. 7.697.952.000		

Kondisi Pelayanan

Keberhasilan pengembangan sektor perikanan di Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya. Target utama yaitu pelayanan yang efektif, efisien dan cepat. Kegiatan pelayanan syahbandar perikanan yang berkaitan kapal melaut, lokasinya masih belum satu tempat, sedangkan pelayanan terpadu diartikan pelayanan yang melaksanakan kegiatan dengan satu tempat dari awal lapor sampai terbitnyanya surat perintah berlayar, sehingga memudahkan nelayan dan kegiatan pun dapat berjalan efektif, efisien dan cepat.

Kondisi Kinerja Pegawai

Pembangunan perikanan untuk pegawai teknis perikanan hanya dilakukan oleh 3 orang teknis pegawai perikanan yang tidak mempunyai latar belakang perikanan sehingga kemajuan pelayanan menjadi sedikit terkendala. Berdasarkan data yang didapat, pegawai PPI yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis perikanan terkait pelayanan kurang memuaskan baik untuk kegiatan daerah maupun kegiatan pusat. Untuk kinerja pegawai masih sesuai tupoksi, tetapi masih ada juga beberapa yang tupoksinya masih tumpang tindih mengingat kurangnya SDM di PPI. Dengan demikian, jika diadakan pelayanan terpadu di PPI perlu adanya pengadaan pegawai baik untuk pegawai secara honor maupun tetap dibidang perikanan dan manajemen.

Tabel 11. Jumlah PNS UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa – Pangkalpinang

No	Tingkat Pendidikan Pangkat/Golongan	Jumlah	Jabatan
1.	Sarjana Perikanan (Penata/ III.c)	1 orang	Kepala UPT PPI/TPI
2.	Sarjana Pertanian (Penata Muda Tk.I/III.b)	1 orang	Subbag Kepegawaian
3.	SMA/SLTA(Pembantu Muda/II.b)	2 orang	Bend. Pembantu Penerima
4.	SMP/SLTA/I.c	2 orang	Kord. Pencatatan Pelelangan Ikan
Jumlah Pegawai		6 orang	

Tabel 12. Jumlah Pegawai Honorar UPT PPI/TPI

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Tugas
1.	SMA/SLTA	3 orang	Juru Catat Pelelangan Ikan
2.	SMP/SLTP	5 orang	Juru Catat Pelelangan Ikan
3.	SD	5 orang	Petugas Kebersihan
Jumlah Pegawai		13 Orang	

4.4 Gambaran Umum Penerapan Pelayanan PPI

Dalam rangka pengembangan sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung melaksanakan program pembangunan Pelabuhan Perikanan, serta meningkatkan kualitas lingkungan kawasan. Pelabuhan yang dirancang sebagai tempat pelayanan yang optimal mulai dari izin lapor kedatangan maupun keberangkatan kapal dan perbekalan serta kegiatan lain yang terkait dengan pendaratan ikan yang rapi serta memenuhi standar pelabuhan, dan merupakan tempat untuk pembinaan dan pemantauan kegiatan sektor perikanan di Provinsi Bangka Belitung maupun skala Regional dan Nasional.

Selaras dengan visi Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu “Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan sektor industri unggulan”, semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sedapat mungkin memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Agar cita-cita organisasi dapat tercapai dengan baik, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa misi yang salah satunya adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendorong pengembangan usaha dan investasi dibidang kelautan dan perikanan serta mewujudkan kawasan industri perikanan Muara Sungai Baturusa, juga mengembangkan dan mengelola secara optimal sumberdaya kelautan, perikanan dan wilayah pesisir.

Dalam rangka mewujudkan kawasan industri perikanan Muara Sungai Batu Rusa serta mengembangkan dan mengelola secara optimal sumber daya kelautan, perikanan dan wilayah pesisir, merupakan pertimbangan yang kuat untuk mewujudkan perencanaan penataan kawasan PPI Muara Sungai Batu Rusa yang mampu memenuhi secara optimal fungsi dan pemanfaatannya, tata letak dan arsitektural serta kontribusi positif bagi perkembangan di daerah. Dengan demikian, tujuan dari rencana pembangunan pelabuhan perikanan ini adalah: a. Penyediaan sarana dan prasarana bagi nelayan Pangkalpinang dan sekitarnya,

- b. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap,
- c. Pengembangan jaringan pemasaran produk perikanan. Dalam kondisi darurat dapat dijadikan sebagai basis pertahanan negara. tujuan tersebut merupakan hal utama yang harus dikaji dari segi pelayanan dengan dilakukan penerapan pelayanan yang optimal.

4.5 Karakteristik Responden

Hal pertama yang dilakukan dalam proses penelitian ini adalah wawancara mendalam. Kedua Pengisian kuesioner secara tertutup kepada Kepala/Koordinator

PPI Muara Sungai Baturusa dan Kepala seksi Perikanan Kota Pangkalpinang. Kuesioner yang dibagikan terdiri dari beberapa bagian dengan menanyakan segala hal yang sangat berkaitan dengan implementasi manajemen penerapan pelayanan terpadu PPI Muara Sungai Baturusa terhadap kepuasan nelayan Pangkalpinang.

Jenis Kelamin

Kuesioner yang disebarakan tidak membedakan gender antara laki-laki dan perempuan. Distribusi responden untuk dijadikan sebagai target dalam penelitian ditinjau dari jenis kelamin responden tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	7	87,5
2.	Perempuan	1	12,5
	Jumlah	8	100

Berdasarkan Tabel 13, tergambar bahwa dari total responden sebanyak 8 orang, sebagian besar adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa di PPI masih perlu kebutuhan pegawai perempuan bagian pelayanan dan administrasi kantor. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan pelayanan di PPI dimana dalam analisa pegawai masih banyak tupoksi tumpang tindih.

Tabel 14. Sebaran responden berdasarkan Instansi

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	2	25
2.	Dinas Perikanan Kota Pangkalpinang	1	12,5
3.	Satker PSDKP (UPT Pusat)	2	25
4.	PPI Muara Sungai Baturusa	3	37,5
	Jumlah	8	100

Berdasarkan Tabel 14, Penentuan responden tersampel diharapkan mampu mewakili bagaimana kondisi Penerapan Pelayanan, serta merumuskan strategi kebijakan dengan metode SWOT. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*.

Kriteria sampel atas responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sebagai pengambil keputusan dalam penerapan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang.
2. PPI Muara Sungai Baturusa sebagai pelaksana implementasi penerapan pelayanan PPI
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Satker PSDKP sebagai koordinator Penerapan Pelayanan di PPI Maura Sungai Baturusa.

Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan seseorang merupakan faktor yang akan mempengaruhi seseorang dalam kehidupannya terutama dalam melakukan pekerjaan. Disamping itu latar belakang pendidikan akan menjadi dasar berpikir seseorang dalam mengemukakan pendapat dan pengambilan keputusan. Pengelompokan responden berdasarkan tingkat pendidikan tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA	2	25
2.	S1	4	50
3.	S2	2	25
Jumlah		8	100

Berdasarkan Tabel 15, tergambar bahwa dari 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi responden dapat diketahui, tingkat pendidikan strata satu (S1) menunjukkan paling tinggi. Dengan demikian diharapkan, dengan pendidikan yang baik, dapat mendukung penerapan pelayanan di PPI kedepan dapat tercapai sesuai visi dan misi DKP Kota Pangkalpinang serta memberikan kemudahan nelayan mengakses pelayanan yang diberikan PPI tanpa harus keluar dari lokasi PPI.

Pengalaman bekerja

Pengalaman dalam bekerja merupakan modal seseorang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan selanjutnya. Dalam penelitian ini, informasi mengenai pengalaman kerja responden tersaji pada Tabel 16.

Tabel. 16. Sebaran responden berdasarkan pengalaman kerja

No	Lama bekerja (tahun)	Jumlah	Persentase
1.	0-9	2	25
2.	10-19	4	50
3.	20-29	1	12,5
4.	30-39	1	12,5
Jumlah		8	100

Berdasarkan Tabel 16, tergambar bahwa pegawai yang dengan masa kerja diatas 10 (sepuluh) tahun yang terbanyak. Hal ini dikarenakan informasi dan pengalaman yang telah bekerja di PPI telah banyak mengetahui kekurangan serta kebutuhan nelayan. Mereka dapat memberikan data perkembangan dari tahun ketahun sehingga dapat dijadikan acuan dalam penerapan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang.

4.6 Proses Penerapan Pelayanan di PPI

Manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasandapat diterapkan dalam pelayanan terpadu agar saat kegiatan yang telah dibuat dengan program dapat berjalan dengan baik salah satu kegiatan pelayanan di PPI.

Perencanaan menurut Koontz, *et,al*, (1984), perencanaan merupakan salah satu fungsi fundamental dari manajemen yang sangat menentukan, karena di dalamnya termuat apa yang diinginkan oleh suatu organisasi serta langkah-langkah akan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya (Handoko, 1999).

Menurut Nawawi (2000) pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*) yang dilakukan setelah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk.

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Pada umumnya Pangkalan Pendaratan Ikan berfungsi memberikan pelayanan yang optimal terhadap segenap aktifitas ekonomi perikanan.

4.6.1 Manajemen Pelayanan

Menurut pendapat Manullang (1985:17) definisi manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi manajemen itu dapat dikatakan suatu proses yang dilakukan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.

Dr. Sarlito Wirawan mengemukakan pengertian pelayanan dalam 2 (dua) sudut pandang, yang pertama bagi pelanggan; pelayanan akan selalu berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang yang didapatkan pada suatu interaksi yang dilakukannya. Kedua, bagi petugas (perusahaan/organisasi) tentunya pelayanan akan merupakan aktivitas untuk menumbuhkan rasa senang, dan itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan orang yang dilayani.

Maka dapat diartikan manajemen pelayanan yaitu konsep yang dimulai dengan perencanaan sampai dengan pengawasan yang memberikan jasa sehingga menghasilkan rasa terhadap penerima layanan/jasa. Setelah dilakukan pengolahan data terhadap manajemen pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa maka di dapat sebagai berikut:

Perencanaan Pelayanan

Perencanaan yang baik memiliki dua faktor yang pertama kesesuaian tujuan dengan bentuk pelayanan yang diberikan. Faktor kedua memiliki sistem prosedur pelayanan yang jelas faktor ini prosedur yang diterima jasa pelayanan mudah, cepat dan tidak berbelit – belit.

Sistem dan prosedur pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa belum semuanya dilaksanakan secara cepat dan tepat masih membutuhkannya waktu dalam menerima pelayanan ini sehingga tahapan yang dilalui tidak di satu tempat serta belum memadainya sarana dan prasana pelayanan.

Pelaksanaan Pelayanan

Tahapan pelaksanaan pelayanan dilaksanakan setelah perencanaan pelayanan, tahapan ini dipengaruhi kualitas dan konsisten aparat dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pelanggan/nelayan. Komponen penting dalam pelaksanaan yaitu waktu atau tahapan pelayanan mulai dari pengajuan permohonan hingga penyampaian hasil layanan semakin singkat waktu penyelesaian maka semakin puas pelanggan.

Berdasarkan ketepatan waktu pelayanan yang diberikan di PPI Muara Sungai Baturusa maka pelaksanaan masih belum baik penyebab utama rendahnya ketepatan waktu dan rendahnya konsisten dalam penerapan sistem dan prosedur pelayanan.

Pengawasan Pelayanan

Tahapan terakhir pengawasan pelayanan dengan indikator cara dan proses agar organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yaitu berupa pelaporan, monitoring pengawasan atasan dan kepastian penyelesaian keluhan. Pelayanan yang dilakukan tidak selamanya secara baik dan sempurna adakalanya faktor ketidaksengajaan oleh aparat atau bisa jadi ada sesuatu yang belum terpenuhi oleh pelanggan.

Keluhan nelayan yang dialami disampaikan ke petugas pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa dan tidak sedikit disampaikan ke pihak luar. Apabila keluhan yang dialami ke bagian aparat yang menangani pelayanan maka dimungkinkan keluhan dapat diatasi dan perbaikan masa yang akan datang.

Prosedur penanganan keluhan di PPI Muara Sungai Baturusa ada tiga tahapan pertama tahapan penyampaian keluhan, kedua penanganan keluhan dan penyampaian hasil keluhan, Diantara keluhan adanya alat tangkap yang dilarang

digunakan, pembagian BBM yang belum teratur dan masih banyaknya nelayan yang belum taat melapor sehingga data kapal baik ABK sampai alat tangkap yang digunakan belum terdaftar di PPI Muara Sungai Baturusa (Dinas Perikanan Kota Pangkalpinang).

4.6.2 Kepuasan Nelayan

Pemberian pelayanan akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nelayan. Kepuasan nelayan penting dalam menunjang kinerja dan pengembangan suatu pelabuhan. Ada berapa faktor yang mempengaruhi kepuasan nelayan terhadap pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa yaitu

Sumber Daya Manusia

Keterkaitan petugas apakah sudah mencukupi belum maka di dalam penelitian dengan wawancara kepada nelayan dan pemangku kepentingan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang masih kurang sehingga untuk memberi pelayanan belum optimal.

Sarana dan Prasana Pelayanan

Tahapan ini berdasarkan data dan informasi diambil dari penelitian. Sarana dan prasana pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa masih belum memadai untuk memberikan pelayanan terutama pelayanan terpadu karena masih minimnya fasilitas yang digunakan bagi petugas pelayanan.

Sistem dan Prosedur

Sistem dan Prosedur pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang masih belum tertata dengan baik karena dilaksanakan tidak satu tempat sehingga banyaknya nelayan yang tidak mengetahui alur ini. Berdasarkan data dari wawancara nelayan, maka masukan nelayan untuk kedepannya dapat dilaksanakan di satu tempat dengan memasang SOP atau alur informasi pelayanan di dalam kantor PPI Muara Sungai Baturusa sehingga memudahkan dalam mengakses pelayanan tersebut.

Kecepatan Pelayanan

Kecepatan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa sudah baik akan tetapi karena tempat yang berbeda maka untuk melakukan pelayanan selanjutnya memakan waktu, Harapan nelayan agar pelayanan singkat dan cepat waktu pelayanannya sehingga memberi kenyamanan nelayan dalam mengaksesnya

Tabel 17. Analisis gap proses Manajemen Penerapan pelayanan terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang terhadap nelayan Kota Pangkalpinang

No	Kegiatan	Kondisi yang di harapkan	Kondisi saat ini	Degree of fit	Persentase Responden	Penyebab
1	Indikator Kinerja	PPI harus memiliki indikator kinerja program dan kegiatan yang jelas dan konsisten	PPI belum memiliki indikator yang jelas	<i>Partial</i>	90	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman perencanaan PPI dalam indikator kinerja (input, outcome, benefit, dan impact) - Jumlah pegawai masih terbatas, terjadi tumpang tindih tugas - Sarana dan prasarana belum memadai
2	Target kinerja	Target kinerja yang jelas	Target kinerja belum memiliki kriteria	<i>Partial</i>	100	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman pelayanan
3	Evektivitas	Adanya indikator kinerja dimasukan ke dalam perencanaan	Adanya indikator kinerja dalam perencanaan dan penganggaran sebagai parameter efektivitas namun tidak konsisten	<i>Partial</i>	80	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kapasitas dan pemahaman pegawai terkait pelayanan dalam penyusunan indikator kinerja - Jumlah pegawai PPI masih terbatas, tidak sesuai dengan kapasitas kerja yang diemban
4	Tingkat pelayanan	PPI dalam pelayanan perikanan belum memadai	Kegiatan masih dikategorikan cukup dan melaksanakan pelayanan terpadu	<i>Partial</i>	80	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya komitmen yang jelas dari dalam penyusunan program pelayanan terpadu

Hasil analisis gap yang tersaji pada Tabel 17, tergambar bahwa proses penerapan pelayanan terpadu masih perlu dikaji lebih dalam. Masih banyak kekurangan yang sifatnya parsial dari segi SDM, kinerja pegawai dan fasilitas pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang.

4.7 Analisis Strategi Penerapan Pelayanan Terpadu di PPI

Analisis strategi penerapan pelayanan terpadu di PPI menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities dan Threats*). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*) yang dimiliki, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Hasil analisis SWOT sebagai berikut :

4.7.1 Identifikasi Faktor Kunci Internal dan Eksternal

Menurut Hunger & Wheelen (2003), untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan atau organisasi, pembuatan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan atau organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) pada situasi sekarang. Analisis SWOT dilakukan dalam rangka menentukan pemilihan strategi paling sesuai dalam membangun PPI khususnya dalam penguatan penerapan pelayanan terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa. Data yang diolah diperoleh dari persepsi narasumber yang merupakan pegawai dan kepala PPI yang telah memiliki masa kerja di PPI lebih lima tahun serta pegawai dan kepala PPI Muara Sungai Baturusa yang mulai dibangun sampai sekarang masih kerja di PPI Muara Sungai Baturusa.

Terdapat dua faktor yang penting menjadi tujuan yang hendak dijangkau dari persepsi yaitu faktor kunci internal (IFE) dan faktor kunci eksternal (EFE) yang dimiliki oleh PPI Muara Sungai Baturusa. Faktor kunci internal dan eksternal tersebut akan menghasilkan empat elemen faktor penting yaitu (1) faktor kekuatan; (2) faktor kelemahan; (3) faktor peluang; (4) faktor ancaman.

Analisis SWOT merupakan model analisis untuk membandingkan faktor kunci eksternal berupa peluang dan ancaman dengan faktor kunci internal berupa

kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut sebagai berikut.

Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan identifikasi potensi terhadap pelayanan terpadu di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang, maka ditemukan beberapa faktor untuk menentukan strategi sebagai berikut

Tabel 18. Faktor Internal dan Faktor Eksternal

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	Letak strategis	Dukungan Pemerintah
2.	Struktur dan organisasi	Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD
3.	Fasilitas PPI	Pangsa pasar hasil tangkapan
4	Tingkat keamanan lingkungan UPT PPI	Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan
5.	Sumberdaya Manusia	Keamanan aktivitas melaut
6.	Pengelolaan limbah padat dan cair	Menurunnya stock ikan
7.	Infrastruktur jaringan listrik dari PLN	Penggunaan alat tangkap yang dilarang
8.	Jalan akses menuju UPT PPI	<i>Ilegal Fishing</i>

2. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Faktor Internal

Kekuatan (*Strength*)

1) Letak Strategis

Berdasarkan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Batu Rusa terletak di Kelurahan Ketapang Pangkalpinang dengan titik koordinat BT 106,09', 13,51" dan LS 2,05', 10,22". Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa

Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari sistim perikanan tangkap secara keseluruhan, juga merupakan *interface* antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktifitas perikanan didarat (pengolahan dan pemasaran) serta merupakan pusat segala aktifitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya.

Secara geografis Kota Pangkalpinang terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu berada ditengah – tengah Pulau Bangka dan dekat dengan Pulau Sumatera (Jakarta) dan Kalimantan bahkan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Karena letaknya yang sangat strategis tersebut maka Kota Pangkalpinang disamping sebagai Ibu Kota Provinsi juga mempunyai sebagai pusat pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2). Struktur dan organisasi

Organisasi dan struktur kerja yang baik dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang struktur dan Organisasi UPT PPI Muara Sunga Baturusa Pangkalpinang serta pembagian kerja yang jelas pada masing-masing elemen pembentuk organisasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Maka suatu organisasi dan struktur yang jelas tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik termasuk kegiatan pelayanan yang memberikan manfaat banyak terhadap orang yang menggunakan akses tersebut.

Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dan dinas daerah Kota Pangkalpinang

UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan ;
- pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi penataan pedagang ikan maupun nelayan yang akan bertransaksi, pengawasan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan penataan ketertiban dan keamanan pangkalan pendaratan ikan, serta menjaga kebersihan pangkalan pendaratan ikan.
- pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Susunan Organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang adalah Pelabuhan Perikanan tipe D yang merupakan UPT Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang dalam melaksanakan tugas tentang Organisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan serta pemanfaatan saranaPangkalan Pendaratan Ikan;
- b. Pelayanan teknis kapal perikanan, dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- c. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pangkalan pendaratan ikan;

- d. Pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi diwilayahnya untuk meningkatkan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengelolaan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- g. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengelolaan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- h. Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan tangkap diwilayahnya;
- i. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari.

3). Fasilitas PPI

Fasilitas yang digunakan untuk melayani pengguna jasa meliputi fasilitas sebagai berikut:

a. Fasilitas Pokok.

Fasilitas Pokok adalah fasilitas yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan umum, termasuk untuk dapat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat hasil meliputi kolam pelabuhan, pemecah gelombang (*break water*), dermaga/*jetty*, turap (*revetment*) dan tanah industri perikanan

b. Fasilitas Fungsional

Fasilitas Fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun diusahakan lebih lanjut oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Indonesia dan perorangan meliputi TPI, pabrik es, *cold storage*, dan ruang *processing*

c. Fasilitas Penunjang

Fasilitas Penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum meliputi antara lain kantor UPT, Perum, pos pelayanan terpadu, Balai Penyuluhan Nelayan, MCK, sarana peribadatan, dan pos keamanan.

4). Tingkat Keamanan Lingkungan UPT /PPI

Potensi sumberdaya perikanan di laut terutama di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang sangat berlimpah, sehingga banyak nelayan yang memanfaatkan sumberdaya tersebut. Maka dengan alasan tersebut nelayan menggunakan akses PPI yaitu terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan PPI mulai dari penangkapan, bersandar sampai dengan pelelangan ini terbukti adanya pos keamanan di sekitar PPI yang menjaga aktivitas kegiatan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang

Kelemahan (*Weaknesses*)

1) Sumberdaya Manusia

- a. Kualitas dan kuantitas pegawai PPI di PPI Muara Sungai Baturusa masih rendah. Pegawai PPI belum adanya latar belakang teknis perikanan. Jumlah pegawai untuk pelayanan di PPI belum memadai sehingga tidak sesuai dengan tugas yang diemban, menginggit pegawai PPI juga mengerjakan tugas TPI sehingga tumpang tindih tupoksi kinerja
- b. Pengembangan SDM pelayanan oleh Pemerintah Daerah masih kurang memadai.
- c. Pengembangan kompetensi SDM seperti sosialisasi, Bimtek, dan Diklat sangat minim dilakukan. Hal ini akan berdampak terhadap kualitas penerapan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang.
- d. Anggaran PPI dalam meningkatkan kapasitas pelayanan masih terbatas.
- e. Biaya terkait pengembangan SDM di PPI telah dianggarkan, namun tidak dikhususkan bagi personil atau aparatur pelayanan .
- f. Tenaga Fungsional terkait pelayanan perikanan yang handal masih terbatas. Rekrutmen PNS dengan formasi jabatan fungsional perikanan belum diakomodir dari pemerintah daerah serta personil berlatar belakang perikanan hampir sebagian besar di tempatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

- 2). Keterbatasan dalam pengelolaan limbah padat dan cair
 - a. Penanganan limbah padat dan cair berupa sampah plastik dan sisa ikan dan kerang-kerangan yang masih menjadi kendala timbulnya penumpukan sampah dalam UPT PPI/TPI
 - b. Keterbatasan Anggaran dari pihak Pemerintah Kota dalam hal pelaksanaan pengelolaan limbah cair yang sudah ada dilakukan studi awal terhadap pengelolaan limbah cair dan keterbatasan jumlah container sampah oleh Dinas Kebersihan dan Kebakaran Pemkot dalam mengangkut limbah sampah padat yang berada pada UPT PPI/TPI
- 3). Infrastruktur jaringan listrik dari PLN
 - a. Infrastruktur jaringan listrik dari PLN yang belum memenuhi kebutuhan operasional kegiatan pelelangan ikan, aktivitas perkantoran pada UPT PPI/TPI dan kegiatan bidang perikanan lainnya misalnya pengembangan *cool storage*, pabrik es dan masih pemenuhan kebutuhan listrik masih terpegantung kepada Generator Set (genset). Dampak yang lain adalah terhambatnya investasi oleh pihak swasta/investor dalam kegiatan usaha bidang perikanan antara lain Pembangunan *Cool Storage*, Pabrik Es, Doking Kapal
 - b. Sampai dengan sekarang sudah dilakukan survey oleh PLN namun belum ada perkembangan yang berarti, mereka beralasan terkendala Pengadaan Gardu Listrik yang mahal harganya.
- 4). Jalan akses menuju UPT PPI
 - a. Jalan akses menuju UPT PPI/TPI yang mengalami kerusakan diakibatkan adanya aktivitas pembangunan Jembatan Baturusa II, Kegiatan pengangkutan batu split untuk proyek jalan raya oleh Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan kegiatan aktivitas Perusahaan Peleburan Timah (Smelter) dalam pengangkutan batu bara dan material proyek lainnya. Sehingga berdampak pada kegiatan Operasional Perdagangan dan Pelelangan ikan pada UPT PPI/TPI para pemasok/ distributor ikan yang berasal dari Kabupaten sebagai central pemasok ikan di Kota Pangkalpinang merasa enggan mengangkut ikannya ke UPT PPI/TPI dikarenakan sering mengalami kerusakan mobil pengangkut ikan, bahkan ada yang terguling muatan ikannya

- b. Namun pada kenyataannya dari pertemuan antara Pihak Pemda dan Pihak Swasta dalam hal ini dipimpin langsung oleh Walikota Pangkalpinang, belum ada hasilnya dan jalan akses menuju ke UPT PPI/TPI masih dalam kondisi rusak berat .

Faktor Eksternal

Peluang (*Oppurtunities*)

1) Dukungan Pemerintah Daerah.

Terdapatnya Peraturan Pemerintah mengenai pelayanan perikanan dalam mendukung kebijakan penerapan pelayanan perikanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang mengacu PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan dalam pasal 9 PPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang salah satu kriteria teknisnya yaitu mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia. Pelayanan terpadu perikanan diutamakan untuk memberi kemudahan kapal dalam aktivitas kegiatan melaut agar tidak ada pelanggaran dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/KEPMEN-KP/2018 Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Sungai Baturusa sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkalpinang maka dengan naik kelas PPI dapat dijadikan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan berskala usaha kecil dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perikanan, pengembangan wilayah, agribisnis dan agroindustri serta sebagai pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah..

- 2). Dukungan Pemerintah daerah dalam menganggarkan sarana dan prasarana fasilitas PPI Muara Sungai Baturusa ini.

2). Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari sistim perikanan tangkap secara keseluruhan, juga merupakan interface antara aktifitas perikanan di laut (penangkapan) dengan

aktifitas perikanan didarat (pengolahan dan pemasaran) serta merupakan pusat segala aktifitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti usaha penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang nilai cukup strategis, karena mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, dapat memajukan ekonomi dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan pendapatan asli daerah (PAD)

3). Pangsa pasar hasil tangkapan

- a. Letak yang sangat strategis yaitu berada ditengah – tengah pulau Bangka dan dekat dengan Pulau Sumatera, Jawa (Jakarta) dan Kalimantan bahkan dekat dengan Singapura dan Malaysia, maka memberi kemudahan untuk pemasaran hasil perikanan berdasarkan hasil survey lapangan pemasaran hasil tangkapan ke Singapura dan Malaysia
- b. Hasil tangkapan yang berlimpah sebagian diolah menjadi produk yang siap di makan baik usaha rumahan maupun industri telah dipasarkan ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

4). Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung potensi hasil perikanan sebanyak 2.088,50 ton/tahun dengan pengolah sebanyak 160 orang dan dengan pemasaran sebanyak 193 orang. Dengan berubah status PPI menjadi PPP serta terkontrol kapal masuk dan keluar akan membuka ruang bagi investasi perikanan yang lain tumbuh dan berkembang yang telah berjalan seperti Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan Modern (*Cold Storage*) yaitu PT Sanjaya Fisherindo, PT. Surya Sepakat Pulau Bangka (SSPB), PT Surya Hasil Laut (SHL), PT. Cahaya Bintang Laut Abadi (CBLA) dan PT. Bangka Tropindo Adimitra (BTA).

Ancaman (*Threats*)

1) Keamanan aktivitas melaut

Nelayan merupakan motor penggerak aktivitas ekonomi dan sosial ekonomi dan sosial di wilayah pesisir Indonesia tidak pungkiri masih banyak permasalahan pada aspek keselamatan dan kemananan dilaut yang dipengaruhi oleh cuaca yang sering berubah, sarana dan prasana melaut belum standar dengan tidak taat nelayan tradisonal untuk melapor kedatangan dan keberangkatan pada saat melakukan aktivitas melaut ke kesyahbandar perikanan sehingga terjadi kecelakaan pada saat melaut semua data nelayan akan sulit untuk di ketahui dimana data statistik tahun 2016 nelayan di Pangkalpinang sebanyak dua ribu dua ratus empat puluh delapan.

2) Menurunnya Stock ikan

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar Hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (KEP MEN KP Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Tahun 2016 Produksi Perikanan Tangkap Bangka Belitung adalah sebesar 188.572, 60 Ton atau 35.14% dibandingkan tahun 2015 lalu yaitu 139.542.90 ton. Jumlah produksi 2088,5Ton. Dari data yang berhasil dihimpun, produksi tahun 2016 jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah ikan tembang disusul komoditas ikan Japuh, Siro, komoditas rajungan dan tenggiri.

Berdasarkan data statistik perikanan tangkap tersebut potensi perikanan cukup besar seharusnya nelayan sudah sejahtera akan tetapi masih banyak di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan pengelolaan belum efektif dan banyak nelayan menangkap ikan secara berlebihan tanpa memperhatikan lingkungan.

- 3) Penggunaan alat tangkap yang dilarang
 - a. PERMEN. KP Nomor. PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Pukat Hela adalah alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008).
 - b. PERMEN. KP Nomor. PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (*Gill Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Gillnet* adalah alat penangkapan ikan yang jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal (SNI 7277.8:2008).

Berdasarkan Permen KP sudah jelas alat tangkap yang diperbolehkan digunakan bagi nelayan, akan tetapi masih adanya laporan nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Ada beberapa faktor penyebab diantaranya jaminan dari Kepolisian Republik Indonesia yang berjanji untuk melindungi nelayan kecil yang masih menggunakan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan. Meskipun ada sanksi tegas berupa pidana kurungan pada Permen, namun pada Undang-Undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, disebutkan bahwa nelayan mendapatkan perlindungan dari hukum dan juga keselamatan.

Di antara yang masuk dalam perlindungan tersebut, adalah pembebasan nelayan kecil dari kewajiban untuk memasang sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*) dan pembebasan nelayan kecil

dari kewajiban memiliki SIUP/SIPI/SIKPI, serta tidak adanya sanksi penjara untuk nelayan kecil. Itulah yang membuat para nelayan masih memakai menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

4) *Illegal Fishing*

Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang secara geografis dikelilingi lautan dan selat. Hal ini menyebabkan sektor perikanan didominasi oleh perikanan laut yang diperoleh melalui aktivitas penangkapan, maka dengan letak yang strategis tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi *illegal fishing* maka dapat terjadinya *over fishing*.

Berdasarkan penilaian responden terhadap faktor internal dan eksternal yang ada, maka dapat ditentukan tingkat kekuatan dan kelemahan serta tingkat peluang dan ancaman dapat dilihat pada Tabel 19

Tabel 19. Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman)

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Kekuatan <ul style="list-style-type: none"> • Letak strategis (S1) • Struktur dan organisasi (S2) 	3 Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah (O1) • Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD (O2) • Pangsa pasar hasil tangkapan (O3) • Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan (O4)
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas PPI (S3) • Tingkat keamanan lingkungan PPI (S4) 	

2.	Kelemahan	4	Ancaman
	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya Manusia (W1) • Pengelolaan limbah padat dan cair (W2) • Infrastruktur jaringan listrik dari PLN (W3) • Jalan akses menuju UPT PPI (W4) 		<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan aktivitas melaut (T1) • Menurunnya stock ikan (T2) • Penggunaan alat tangkap yang dilarang (T3) • <i>Illegal Fishing (T4)</i>

2. Pembobotan Faktor Kunci Internal dan Eksternal

Pembobotan dari unsur yang di dapat dari faktor internal dan eksternal ditentukan dengan cara memberikan pertanyaan melalui kuesioner kepada responden. Lalu jumlah jawaban dibandingkan dengan total jawaban dari seluruh unsur yang ada sehingga diperoleh pembobotan sebagai berikut pada Tabel 20

Tabel 20. Hasil Pembobotan

No	Faktor Internal	Bobot
1	Kekuatan (S)	
	• Letak Strategis	0,156
	• Struktur dan organisasi	0,144
	• Fasilitas PPI	0,137
	• Tingkat keamanan lingkungan PPI	0,126
2.	Kelemahan (W)	
	• Sumberdaya Manusia	0,117
	• Pengelolaan limbah padat dan cair	0,112
	• Infrastruktur jaringan listrik dari PLN	0,106
	• Jalan akses menuju UPT PPI	0,102
Total		1,00

No	Faktor Eksternal	Bobot
3	Peluang (O)	
	• Dukungan Pemerintah	0,153
	• Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD	0,142
	• Pangsa pasar hasil tangkapan	0,133
	• Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan	0,121
4	Ancaman (T)	
	• Keamanan aktivitas melaut	0,119
	• Menurunnya stock ikan	0,115
	• Penggunaan alat tangkap yang dilarang	0,113
	• <i>Illegal Fishing</i>	0,104
Total		1,00

3. Penentuan Rating Faktor Kunci Internal dan Eksternal

Penentuan rating dari unsur yang di dapat dari faktor internal dan eksternal yang ditentukan dengan cara memberikan pertanyaan melalui kuesioner kepada responden, kemudian jumlah jawaban dibandingkan dengan total jawaban dari per unsur di rata – rata sehingga rerata setiap unsur merupakan nilai dari rating sebagai berikut pada Tabel 21

Tabel 21. Penentuan Rating

No	Faktor Internal	Rating
1	Kekuatan (S)	
	• Letak strategis	3.3
	• Struktur dan organisasi	3.2
	• Fasilitas PPI	3.2

	• Tingkat keamanan lingkungan PPI	4,0
2.	Kelemahan (W)	
	• Sumberdaya Manusia	2,4
	• Pengelolaan limbah padat dan cair	2,3
	• Infrastruktur jaringan listrik dari PLN	2,3
	• Jalan akses menuju UPT PPI	2,1

No	Faktor Eksternal	Bobot
3	Peluang (O)	
	• Dukungan Pemerintah	3,3
	• Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD	3,2
	• Pangsa pasar hasil tangkapan	3,3
	• Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan	3,3
4	Ancaman (T)	
	• Keamanan aktivitas melaut	1,9
	• Menurunnya stock ikan	1,8
	• Penggunaan alat tangkap yang dilarang	1,6
	• <i>Illegal Fishing</i>	1,5

4. Skor (Nilai) Dari Masing-Masing Unsur Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan pengolahan data kuesioner faktor kunci internal diperoleh hasil sebagaimana tersaji pada Tabel 22.

No	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1	Letak strategis	0,156	3,3	0,456
2	Struktur dan organisasi	0,144	3,2	0,476
3	Fasilitas PPI	0,137	3,2	0,309
4	Tingkat keamanan lingkungan PPI	0,126	4,0	0,489
Total Kekuatan		0,563		1,730

Tabel 22. Faktor kekuatan dan kelemahan Penerapan Pelayanan PPI

No	Kelemahan	Bobot	Rating	Skor
1	Sumberdaya Manusia	0,117	2,4	0.164
2	Pengelolaan limbah padat dan cair	0,112	2,3	0.128
3	Infrastruktur jaringan listrik dari PLN	0,106	2,3	0.158
4	Jalan akses menuju UPT PPI	0,102	2,1	0.188
Total Kelemahan		0,437		0.629
Total keseluruhan		1,00		2.359

Berdasarkan pengolahan data kuesioner faktor kunci eksternal diperoleh hasil sebagaimana tersaji pada Tabel 23.

Tabel 23. Faktor Peluang dan Ancaman Penerapan Pelayanan PPI

No	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1	Dukungan Pemerintah	0,153	3.3	0,553
2	Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD	0,142	3.2	0,566
3	Pangsa pasar hasil tangkapan	0,133	3.3	0,568
4	Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan	0,121	3.3	0,547
Total Peluang		0,549		2,234

No	Ancaman	Bobot	Rating	Skor
1	Keamanan aktivitas melaut	0,119	1,9	0,319
2	Menurunnya stock ikan	0,115	1,8	0,326
3	Penggunaan alat tangkap yang dilarang	0,113	1,6	0,329
4	<i>Illegal Fishing</i>	0,104	1,5	0,327
Total Ancaman		0,451		1.301
Total Keseluruhan		1,00		3.692

5. Penentuan Strategi

1. Penentuan Titik Koordinat

$$\frac{(\text{Skor Kekuatan} - \text{Skor Kelemahan})}{2} ; \frac{(\text{Skor Peluang} - \text{Skor Ancaman})}{2} = \frac{1,730 - 0,629}{2} ; \frac{(2,234 - 1,301)}{2} = (0,551 ; 0,467) \approx (0,551 ; 0,467)$$

2. Penentuan Kuadran

Koordinat (0,55 ; 0,46) mempunyai nilai positif dan masuk pada kuadran I.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari gabungan skor faktor kunci internal dan eksternal tersebut berdasarkan skor dari masing faktor-faktor kunci internal dan eksternal, diperoleh hasil bahwa PPI Muara Sungai Baturusa berada pada Kuadran I. Dengan mempunyai faktor-faktor kekuatan diharapkan dapat memanfaatkan peluang yang ada sehingga pelayanan Terpadu PPI dapat diterapkan.

6. Alternatif Strategi

Strategi yang dihasilkan menentukan prioritas strategi dengan melakukan keterkaitan unsur-unsur SWOT yang terdapat dalam suatu alternatif. Jumlah bobot skor/nilai akan menentukan urutan prioritas alternatif strategi untuk menerapkan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang pada Tabel 24

Tabel 24. Rangkaing alternatif strategi penerapan pelayanan terpadu di PPI

No	Unsur SWOT	Keterkaitan	Jumlah Bobot	Rangkaing
1.	Strategis SO	S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3,O4	1,112	1
2.	Strategis ST	S1,S2,S3,S4,T1,T2,T3,T4	1,014	2
3.	Strategis WO	W1,W2,W3,W4,O1,2,O3,O4	0,986	3
4.	Strategis WT	W1,W2,W3,W4,T1,T2,T3,T4	0,888	4

Perumusan alternatif strategi

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan menentukan strategi penerapan pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang sesuai keadaan internal dan eksternal dari hasil wawancara dan kuesioner serta pengamatan dilapangan dianalisa dengan menggunakan matrik SWOT. Menggunakan strategi sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut.

1. Strategi *Stenghts-Oppurtunities (S-O)*

Strategi pertama yaitu memberikan dorongan kepada Pemerintah untuk dapat mengembangkan Pelayanan Terpadu di PPI dengan berjalannya waktu berubah status PPI menjadi PPP. Diutamakan meningkatkan fasitas PPI dengan memfaatkan dukungan pemerintah agar berkembangnya investasi industri perikanan sehingga menambah PAD.

Strategi kedua secara geografis Kota Pangkalpinang terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu berada ditengah – tengah Pulau Bangka dan dekat dengan Pulau Sumatera (Jakarta) dan Kalimantan bahkan dekat dengan Singapura dan Malaysia dengan potensi perikanan dalam skala nasional cukup besar dengan berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (KEP MEN KP Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia). Potensi perikanan cukup besar maka dapat di tingkatkan dengan memperluas pangsa pasar baik melalui hasil tangkapan maupun hasil perikanan yang sudah diolah menjadi produk makanan sehingga menambah kesejahteraan nelayan.

Strategi ketiga PPI Muara Sungai Baturusa untuk menunjang usaha perikanan tangkap dalam memanfaatkan perairan secara optimal dan berkesinambungan serta fungsi di nilai cukup strategis, karena mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka

pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dengan melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan struktur organisasi sehingga tufoksi pelayanan di PPI berjalan.

2. Strategi *Weaknesses-Opportunities (W-O)*

Strategi ini merupakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, menghasilkan strategi pengembangan prasarana/sarana pokok dan penunjang dengan dukungan pemerintah yang telah menganggarkan dana dan DAK dan APBD dari tahun 2005. Diharapkan Pemerintah daerah dan pusat dapat menganggarkan baik anggaran pengembangan PPI maupun anggaran pembangunan yang telah direncanakan.

Strategi kedua meningkatkan perhatian pemerintah untuk dapat mengundang investor agar bersama-sama mengembangkan PPI sehingga lebih siap untuk meningkatkan layanan operasional kepada para pengguna jasanya

Strategi ketiga dengan mendorong Pemerintah untuk meminta tambahan tenaga profesional ke pemerintah daerah atau pusat serta meningkatkan kompetensi pegawai yang telah ada.

3. Strategi *Strenghts-Threats (S-T)*

Strategi S-T merupakan strategi yang diajukan dengan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman dalam upaya penerapan pelayanan terpadu di PPI. Strategi S-T pertama peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna PPI dengan menjaga dan meningkatkan keamanan lingkungan PPI, dilakukan dengan bekerjasama dengan petugas keamanan dari kepolisian dan masyarakat setempat dengan mendirikan pos-pos keamanan lingkungan agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.

Strategi S-T yang kedua adalah potensi perikanan yang skala besar. Perlunya kerjasama antar nelayan, aparat dan instansi terkait maka penegakan hukum dan perundang-undangan dalam kegiatan penangkapan ikan seperti alat tangkap yang dilarang, lokasi penangkapan dan jumlah ikan yang ditangkap pertahun.

4. Strategi *Weaknesses-Threats* (W-T)

Strategi ini disusun atas dasar meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman yang ada. Strategi pertama adalah manajemen digunakan sejak masa mulai diterapkan pelayanan terpadu di PPI dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), sampai dengan pengendalian (*controlling*) berakhirnya suatu kegiatan.

Strategi kedua Pemerintah menganggarkan alokasi penambahan SDM perikanan yang dapat menjalankan pelayanan terpadu sesuai dengan fungsi dimana tupoksi salah satunya agar hasil perikanan yang di produksi dapat diketahui dengan perhitungan berapa besar potensi/stock ikan yang dapat ditangkap per tahun. Dengan demikian potensi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar potensi dapat berkelanjutan yang dilakukan oleh petugas *logbook* dan atau petugas yang ada di ikutsertakan kedalam pelatihan teknis perikanan.

Maka dapat disimpulkan bahwa PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang memiliki kekuatan dan peluang yang sangat baik sehingga memungkinkan dapat menerapkan pelayanan terpadu dengan cara memperbesar dukungan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

Tabel 25. Matriks SWOT dan alternatif strategi Penerapan Pelayanan PPI

<p>EFAS</p> <p>IFAS</p>	<p><i>Strenghts</i>/Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak Startegis 2. Struktur dan Organisasi 3. Fasilitas PPI 4. Tingkat Kemanan Lingkungan UPT PPI 	<p><i>Weaknesses</i>/Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia 2. Pengelolaan limbah padat dan cair 3. Infrastruktur jaringan Listrik dan PLN 4. Jalan akses menuju UPT PPI
<p><i>Opurtunities</i>/Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah 2. Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD 3. Pangsa pasar hasil 	<p>Strategi S-O</p> <p>- Strategi meningkatkan Fasilitas PPI dengan memanfaatkan fasilitas PPI dengan dukungan pemerintah sehingga investasi dapat berkembang agar PAD bertambah (S1, S2, S3, O1,</p>	<p>Strategi W-O</p> <p>- Strategi meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat dalam penerapan pelayanan PPI sehingga dalam menganggarkan pengembangan PPI dan pembangunan lokasi yang telah direncanakan (W1, W2, W3, W4,O1,O2,O3,O4).</p>

tangkapan 4. Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan	O2, O3,O4)	- Meningkatkan perhatian pemerintah untuk penambahan SDM dan serta dapat mengundang investor agar bersama-sama mengembangkan PPI sehingga lebih siap untuk meningkatkan layanan operasional kepada para pengguna jasanya(W1, W2,,O1,O2,O3,O4)
<i>Threats/Ancaman (T)</i>	<i>Strategi S-T</i>	<i>Strategi W-T</i>
1. Kemanan aktivitas melaut	- Strategi meningkatkan keamanan dengan bekerjasama dengan petugas keamanan agar mendirikan pos – pos keamanan	- Manajemen kegiatan dengan menggunakan perencanaan, pengorganisaasi, pelaksanaan dan pengendalian
2. Menurunnya tock ikan	- Penegakan hukum dan perundang-undangan kegiatan aktivitas penangkapan ikan (S1, S2, S3, S4, T1,T2).	memfaatkan fasilitas dan SDM perikanan yang ada untuk pelayanan teknis perikanan di PPI sehingga potensi ikan dapat diketahui berapa jumlah yang harus dimanfaatkan per tahunnya (W6.T1.T2.T3).
3. Penggunaan alat tangkap yang dilarang		
4. <i>Illegal Fishing</i>		

4.8 Perumusan Strategi Pembangunan PPI

Rancangan strategi dapat dilakukan dengan penentuan rating setiap strategi yang dihasilkan dari pembobotan dari matrik SWOT. Penentuan strategi tersebut diperlukan pemegang kebijakan atau pengambil keputusan yang memiliki kewenangan. Berdasarkan hasil gabungan faktor internal dan eksternal dihasilkan beberapa strategi:

1) Penyempurnaan Pelayanan PPI; 2) Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan PPI; dan 3) Dukungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran PPI Operasional dan pengadaan pegawai.

Prioritas utama adalah penyempurnaan pelayanan PPI. Dengan manajemen yang secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen digunakan sejak masa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), sampai dengan pengendalian (*controlling*) berakhirnya suatu kegiatan. Dengan demikian untuk mencapai keberhasilan pelayanan PPI tidak lepas dari peraturan, SDM, sarana dan prasana serta anggaran, adanya keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara pengelola PPI dengan instansi terkait.

Pertama, berdasarkan dari hasil penelitian masih lemah tingkat kinerja sesuai Tugas, Pokok dan fungsi pegawai PPI. Susunan struktur kepegawaian belum lengkap jika mengacu ke Peraturan Menteri Nomor PER/08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, PPI merupakan Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tupoksi diantaranya,

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang masuk ke pelabuhan perikanan wajib melapor ke UPT Pelabuhan Perikanan, Kantor Syahbandar, pada saat masuk dan atau keluar pelabuhan perikanan.
- (2) Berdasarkan laporan mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

- a. UPT Pelabuhan Perikanan melaksanakan pengawasan kapal perikanan dan memberikan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (STBLKK).
 - b. Kantor Syahbandar, memeriksa dan menyimpan Surat Kapal (asli) dan Daftar Anak Buah Kapal (ABK).
- (3) Kapal yang melakukan bongkar muat hasil perikanan mendapatkan pelayanan:
- a. Pembinaan hasil perikanan oleh Dinas Perikanan; dan
 - b. Pengecekan penggunaan alat penangkapan ikan dan hasil tangkapannya oleh UPT Pelabuhan Perikanan.
- (4) Kapal yang secara khusus masuk pelabuhan perikanan untuk melakukan perbaikan/*docking* wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari UPT Pelabuhan Perikanan, dan selanjutnya dilakukan :
- a. Pemeriksaan kerusakan kapal oleh Syahbandar; dan
 - b. Pelayanan perbaikan oleh Perum.
- (5) Kapal-kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan wajib memperoleh pelayanan/penyelesaian administrasi kepelabuhanan (*portclearance*) mengenai :
- a. Surat Perintah Berlayar (SPB)
 - b. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (STBLKK) dari dan
 - c. HPK dan SLO

Kegiatan semua ini masih belum optimal di PPI Muara Sungai Baturusa dikarenakan lokasi pegawai yang melaksanakan tupoksi tidak didalam lokasi PPI sehingga tidak efektif dan efisien waktu bagi nelayan untuk melakukan administrasi kegiatan melaut/menangkap ikan. Diharapkan untuk dapat membentuk struktur yang jelas dengan dasar hukum yang kuat agar PPI dapat berjalan optimal.

Kedua dukungan Pemerintah dapat menganggarkan biaya baik pengadaan maupun perbaikan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk dapat menerapkan pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa. Hal ini dilihat dari fasilitas perkantoran belum banyak tersedia sehingga dalam melaksanakan pekerjaan

terhambat. Dengan demikian, tugas utama kepala PPI untuk membuat atau menganggarkan setiap tahun ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Ketiga, kebijakan pemerintah dalam pengadaan SDM sehingga tupoksi pelayanan dapat berjalan baik mengacu ke Peraturan Menteri. Pelayanan agar berjalan optimal, apabila SDM yang mempunyai kompeten di bidangnya. Dari hasil penelitian masih banyak pegawai yang tupoksinya tumpang tindih, maka Kepala PPI diharapkan untuk dapat menganggarkan pengadaan pegawai yang cukup sesuai tupoksi dan menganggarkan untuk dapat keikutsertaan pegawai yang ada untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sifatnya teknis baik kegiatan pusat daerah maupun kegiatan pusat. Dengan rumusan strategi maka perlunya membuat program rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang

Tabel 26. Rencana Strategis Pelayanan PPI

No	Strategi	Jangka Pendek		
		Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1	Membuat dan menerapkan Struktur Kinerja Pegawai PPI sesuai tupoksi sehingga pelayanan terpadu dapat optimal	√		
2.	Membuat SOP pelayanan yang mengacu ke Peraturan Menteri Nomor PER/08/MEN/2012	√	√	
3.	Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana serta memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak agar dapat berjalan optimal pelayanan di PPI dengan meminta dukungan ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	√	√	
4.	Pemerintah menganggarkan pengadaan SDM yang kompeten di bidangnya	√	√	
5.	Pemerintah menganggarkan	√	√	

	pegawai agar dapat ikut serta kegiatan yang dianggap penting seperti Pelatihan/Diklat kompetensi terkait teknis kegiatan			
6.	Meningkatkan perhatian Pemerintah Daerah untuk mengundang investor untuk bersama-sama mengembangkan PPI		√	√
7	Berkembangnya informasi dan teknologi terkait perikanan sehingga menekan angka kelebihan tangkap (<i>over fishing</i>) serta terdata nelayan setiap aktivitas melaut (keamanan melaut)	√	√	
8.	Pemerintah membentuk koperasi dan perbengkelan nelayan sebagai salah satu perhatian pemerintah kepada nelayan			√



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Manajemen Pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang yang telah naik kelas menjadi kelas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang belum memadai.
2. Sarana dan prasarana dari perspektif pelayanan di PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang masih belum memadai. Tingkat kepuasan nelayan terhadap pelayanan masih kurang.
3. Kinerja pelayanan PPI Muara Sungai Baturusa Pangkalpinang secara umum masih rendah, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan secara konsisten dan penguatan peraturan pemerintah.

Saran

1. Perlunya kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplentasikan peraturan daerah terkait pelayanan terpadu perikanan dengan menerapkan sistem dan prosedur di PPP Muara Sungai Baturusa sehingga penerapan pelayanan terpadu dapat berjalan efektif, efisien dan cepat.
2. Adanya dukungan Pemerintah dalam penganggaran fasilitas sarana dan prasana pelayanan PPP Muara Sungai Baturusa
3. Hasil penelitian dengan analisis manajemen pelayanan terhadap kepuasan nelayan Kota Pangkalpinang di PPP Muara Sungai Baturusa maka fokus dengan kepentingan nelayan dalam pemanfaatan PPP Muara Sungai Baturusa dan peningkatan SDM PPP Muara Sungai Baturusa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayodhoya. (1975). *Lokasi dan fasilitas pelabuhan perikanan*. Bogor: Bagian Penangkapan Ikan Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor
- Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2010).
- DKP.(2006). *Buku petunjuk teknis pelabuhan perikanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- David, F. R.(2011). *Strategic manajemen strategi konsep*, Edisi 12 Jakarta Direktorat Jenderal Perikanan, 1994. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan*. Direktorat Bina Prasarana. Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta.
- DKP Provinsi Bangka Belitung. *Data Statistik Perikanan Tangkap 2015*. Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Data Statistik Perikanan Tangkap 2016*. Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Profil Pelabuhan Perikanan Provinsi Bangka Belitung. Tahun 2017*. Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- DKP Kota Pangkalpinang. *Laporan Tahunan 2012*. Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- DKP Kota Pangkalpinang. *Data Statistik Perikanan Tangkap Kota Pangkalpinang 2016*. Dinas Kelautan dan Kota Pangkalpinang
- Direktorat Jenderal Perikanan, (1994). *Petunjuk teknis pengelolaan Pelabuhan Perikanan*. Direktorat Bina Prasarana. Direktorat Jenderal Perikanan. Jakarta. 140 halaman.
- Direktorat Jenderal Perikanan 1995(dalam Sulistyani,20015). *Fungsi Pelabuhan Perikanan*.

Direktorat Jenderal Perikanan. (1996/1997). *Buku petunjuk pelaksanaan struktur organisasi dan manajemen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)*. Direktorat Bina Prasarana Jakarta

Direktorat Jenderal Perikanan, (2000). *Pedoman pengelolaan pelabuhan perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan*. Direktorat Jenderal Perikanan Jakarta.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2001. *Buku manual operasional Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan*. Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jakarta.

Dr. Sarlito Wirawan, *Personal Interview*

Hariadi .B. (2003).*Strategi manajemen*.Malang: Banyumedia Publishing

Handoko, H. (1999). *Struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi*. Yogyakarta

Hunger, D.J. dan Wheelen, T. L, (2003). *Manajemen strategis*, Diterjemahkan oleh Julianto Agung s. Yogyakarta; ANDI

Keputusan Menteri Nomor : KEP.06/MEN/2008 Tentang *Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela*.

Keputusan Menteri Nomor : KEP.08/MEN/2008 Tentang *Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

Keputusan Menteri Nomor : KEP.45/MEN/2011 Tentang *estimasi potensi sumberdaya ikan pada masing – masing wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia*.

Keputusan Menteri Nomor 67/KEPMEN-KP/2018 *Tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Sungai Baturusa sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.

- Kinnear, T. C.& J.R. Taylor, 1991 *Marketing research: An. applied. approach.* MC. Grow Hill.
- Koontz, Harold, Cyril O, & Heinz W 1984, *Perencanaan merupakan salah satu fungsi Fundamental dari Manajemen*
- Kotler, P. 2002. *Manajemen Pemasaran*, Jilid II, Edisi Millennium. Jakarta : PT. Prenhallindo. Jakarta.
- Lubis, E. 2000. *Pengantar Pelabuhan Perikanan.* Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan PSP. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor
- Lubis, E. 2011. *Kajian peran strategis Pelabuhan Perikanan terhadap pengembangan perikanan laut.* Institut Pertanian Bogor
- Manullang. (1985) , *Defenisi manajemen.* Jakarta
- Mulyadi. (2001). *Sistem akuntansi edisi tiga.* Jakarta : Salemba Empat.
- Murdiyanto, B.(2003). *Pelabuhan perikanan.* Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Nawawi (2000). *Pelaksanaan atau Penggerakan (actuating) yang dilakukan setelah Organisasi memiliki Perencanaan*
- Nurlinda, R.A. 2013. *Pengaruh customer satisfaction strategy terhadap peningkatan kepuasan konsumen.* .Forum Ilmiah. Vol. 10 Nomor 2
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang dibentuknya Provinsi Bangka Belitung
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/ PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang *Surat Laik Operasi Kapal Perikanan*
- Peraturan Menteri Nomor Per/08/Men/2012 Tentang *Pelabuhan Perikanan.* Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor: 08 Tahun 2010 Tentang *organisasi Dinas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk badan dan Dinas Daerah Kota Pangkalpinang.*

- Rangkuti, F. (1998.) *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F., (2000), *Analisis SWOT: Teknik membedah kasusbisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rangkuti, Freddy. 2002. *Measuring customer service*. PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
- Rangkuti, F, 2014. *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building
- Ratminto, dan A.S Winarsih. 2005. *Manajemen pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saleh. A. M . (2010). *Manajemen pelayanan*. Jakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2009), *Metode penelitian kuantitatif, kualitatip dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarso. 2003 *Optimasi fasilitas pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sulistiyani.2005 *Modul pengembangan manajemen pelabuhan perikanan*. Undip Semarang
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas undang - undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan
- Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang perikanan
- Undang-undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- Wheelen, L., Hunger, J. David, (2010) *Strategic management and pusiness policy achieving sustainability. twelfth edition*. Pearson

Lampiran 1. Data Penelitian Kuesioner

KUESIONER

MANAJEMEN PENERAPAN PELAYANAN TERPADU PPI MUARA SUNGAI BATURUSA TERHADAP KEPUASAN NELAYAN KOTA PANGKALPINANG

IDENTITAS RESPONDEN

Isilah keterangan di bawah ini atau beri tanda centang/*check list* (✓) pada pertanyaan pilihan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Jabatan :

Berapa lama anda menduduki posisi saat ini?Tahun

Masa Kerja :

Pendidikan Terakhir :

Latar belakang Pendidikan :

No. HP :

Lampiran 2. Data Penelitian Kuesioner

PEMBOBOTAN FAKTOR INTERNAL

NO	KETERANGAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung penerapan pelayanan terpadu yang jelas	A									
2	Komitmen pimpinan UPT terkait penerapan pelayanan yang tinggi	B									
3	Struktur organisasi dan tupoksi UPT yang jelas	C									
4	Peran DKP Kota dan UPT dalam perencanaan pelayanan yang aktif	D									
5	Kualitas dan kuantitas pegawai pelayanan di UPT masih rendah	E									
6	Pengembangan Pegawai UPT pelayanan oleh Pemerintah Daerah masih kurang memadai	F									

7	Anggaran dalam meningkatkan kapasitas pegawai pelayanan masih terbatas	G				
8	Tenaga fungsional pelayanan yang handal masih terbatas	H				
9	Fasilitas pokok, penunjang dan pendukung di PPI	I				
10	SOP tertulis terkait penerapan pelayanan belum ada	J				

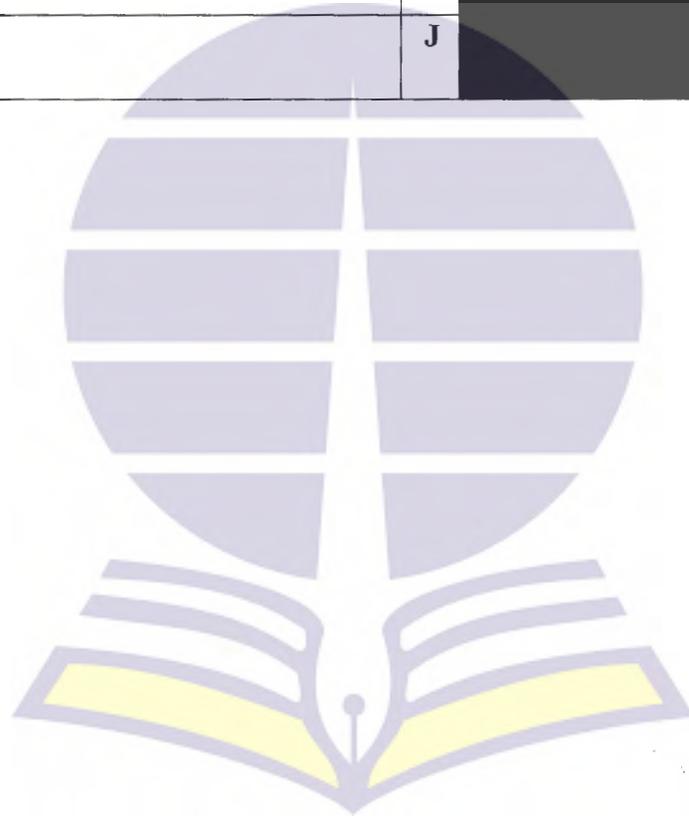


Lampiran 3. Data Penelitian Kuesioner

PEMBOBOTAN FAKTOR EKSTERNAL

NO	KETERANGAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Peraturan Pemerintah Pusat dan daerah tentang sistem penerapan pelayanan yang jelas	A									
2	Kebijakan permenPER.08/MEN/2012 salah satu terkait kegiatan aktivitas kapal lapor/izin (syahbandar perikanan) yang jelas	B									
3	Evaluasi Tim Pusat dan daerah pelayanan PPI setiap tahun	C									
4	Perkembangan investasi terhadap produksi perikanan	D									
5	Pangsa pasar terkait hasil perikanan	E									
6	Data produksi perikanan tersedia setiap hari	F									
7	Jumlah kapal yang bersandar setiap hari	G									

8	Nelayan yang terdata per tahun	H		
9	Alat tangkap dan lokasi penangkapan	I		
10	Jumlah dan jenis tangkapan	J		



Lampiran 4. Data Penelitian Kuesioner

KUESIONER PENENTUAN RATING ANALISIS SWOT UNTUK MANAJEMEN PENERAPAN PELAYANAN TERPADU DI PPI MUARA SUNGAI BATURUSA PANGKALPINANG TERHADAP KEPUASAN NELAYAN KOTA PANGKALPINANG

FAKTOR INTERNAL

Adalah faktor-faktor yang secara internal merupakan kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dalam peenerpan pelayanan di PPI Muara Sungai baturusa terhadap kepuasan nelayan kota pangkalpinang.

Faktor Strategis Internal		Rating/Peringkat			
No.	Kekuatan	1	2	3	4
1	Letak Strategis				
2	Struktur dan organisasi				
3	Fasilitas PPI				
4	Tingkat Keamanan lingkungan PPI				
No.	Kelemahan	1	2	3	4
1	Sumberdaya Manusia				
2	Pengelolaan limbah padat dan cair				
3	Infrastruktur jaringan listrik dan pln				
4	Jalan akses menuju UPT PPI				

Lampiran 5. Data Penelitian Kuesioner

FAKTOR EKSTERNAL

Adalah faktor-faktor yang secara eksternal merupakan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*) dalam penerapan pelayanan terpadu di PPI Muara Sungai baturusa terhadap kepuasan nelayan kota pangkalpinang.

Faktor Strategis Eksternal		Rating/Peringkat			
No.	Peluang	1	2	3	4
1	Dukungan Pemerintah				
2	Sebagai lembaga pengembang perekonomian daerah dan PAD				
3	Pangsa Pasar hasil tangkapan				
4	Tumbuh dan berkembangnya investasi industri perikanan				
No.	Ancaman	1	2	3	4
1	Kemaman aktivitas melaut				
2	Menurunnya stock ikan				
3	Penggunaan alat tangkap yang dilarang				
4	Ilegal Fsihing				

Lampiran 6. Data Produksi

Produksi Perikanan Dirinci Menurut Jenisnya, 2010-2017 Kota Pangkalpinang

Fishery Production by Type of Fish, 2010-2017

Jenis Ikan	Produksi							
<i>Type of Fish</i>	<i>Production</i>							
	(ton)							
1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Tambak/ <i>Dyke</i>	148,00	170,00	814,00	653,70	666,00	715,00	1387,90	853,18
II. Perikanan Darat/ <i>Vapid</i>	31,00	35,65	385,50	261,81	371,81	371,62	30,70	-
2.1 Perairan Umum/ <i>Common Water</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Kolam/ <i>Pond</i>	26,50	30,48	385,50	261,81	371,62	30,70	76,93	88,03
2.3 Sawah/ <i>Swamp Land</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Keramba/ <i>Cage Water</i>	4,50	5,18	-	-	-	-	-	2,62
III. Perikanan Laut/ <i>Oceanic Fishery</i>	19,726,2	25,721,2	29,774,6	18,135,7	18,065,7	1,896,1	2,088,6	2941,39

IV. Budidaya Laut/ <i>Oceanic Cultivation</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Source : *Food and Agriculture of Pangkalpinang Municipality*



Lampiran 7. SK Penetapan Pelabuhan Perikanan



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA SUNGAI BATURUSA SEBAGAI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MUARA SUNGAI BATURUSA, KOTA
PANGKAL PINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa serta pelaksanaan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu menetapkan Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa Sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA SUNGAI BATURUSA SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MUARA SUNGAI BATURUSA, KOTA PANGKAL PINANG, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Pelabuhan Perikanan Muara Sungai Baturusa Sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa; sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Sungai Baturusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan
Organisasi,


Tini Martini



PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG BERBENTUK BADAN
DAN DINAS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

UPT PANGKALAN PENDARATAN IKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

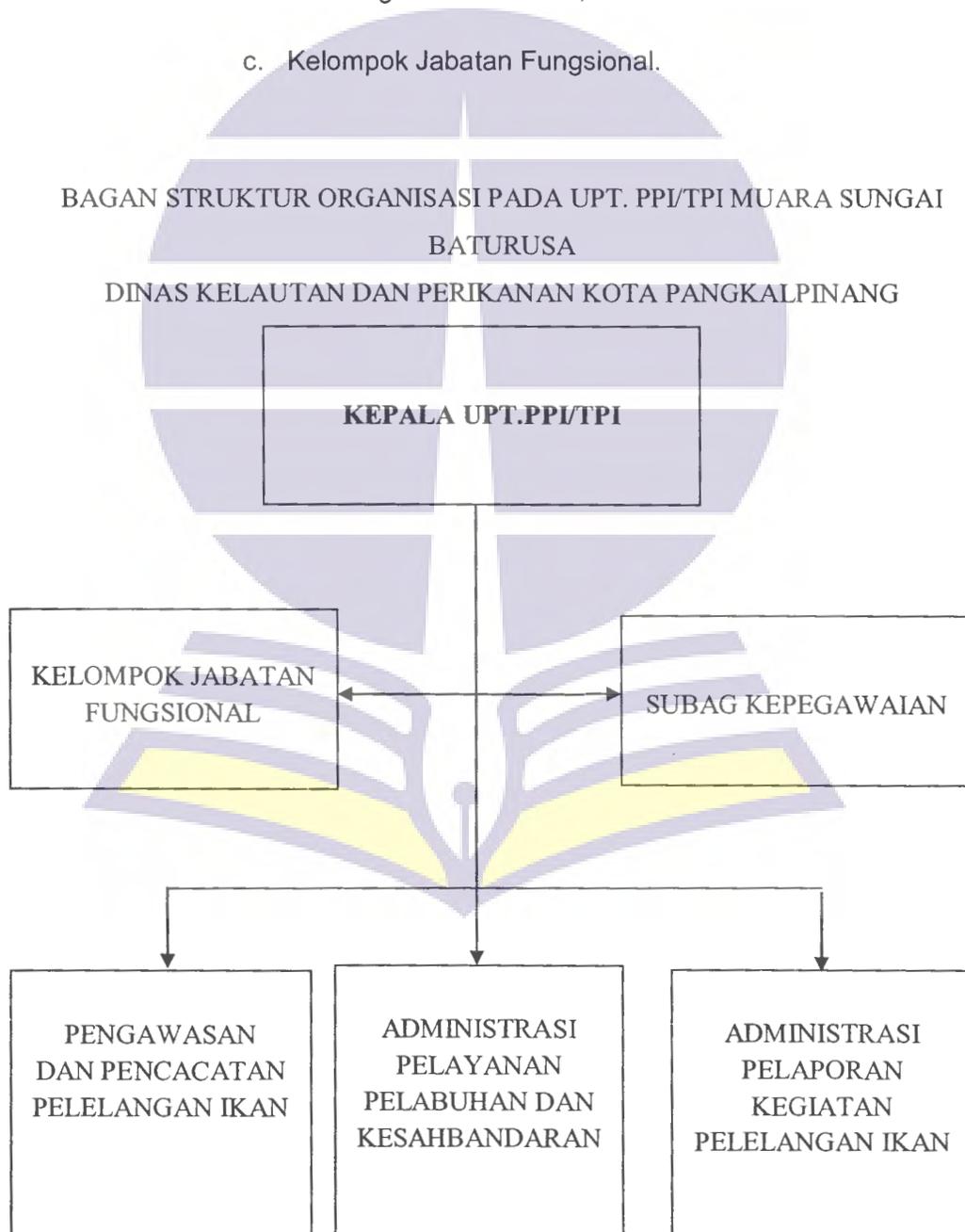
(3) UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- f. penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan ;
- g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi penataan pedagang ikan maupun nelayan yang akan bertransaksi, pengawasan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan penataan ketertiban dan keamanan pangkalan pendaratan ikan, serta menjaga kebersihan pangkalan pendaratan ikan.
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(3) Susunan Organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala UPT ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Lampiran 8. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN)



Lampiran 9. Aktivitas PPI Muara Sungai Baturusa



Lampiran 10. Pelabuhan *Marine capture fisheries production and value by Regency/Town, 2016*

Kabupaten/Kota Regency/Town	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp.1.000)
JUMLAH – TOTAL	188.572,6	4.266.908.000
Kabupaten Bangka	4,463.6	98,571,650
Kabupaten Belitung	65,169.5	815,289,003
Kota Pangkalpinang	2,088.5	61,209,914
Kab. Bangka Barat	12,960.1	239,308,723
Kab. Bangka Tengah	22,988.1	505,415,259
Kab. Bangka Selatan	41,309.6	633,568,570
Kab. Belitung Timur	39,593.2	1,913,544,882



Lampiran 11. Produksi Perikanan Tangkap Tahun, 2010 – 2016

Produksi Perikanan Tangkap (Ton)							
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	20,056.70	24,292.88	24,328.70	18,144.00	18,066.40	1,832.00	2,088.5

Lampiran 12. Produksi Perikanan Tangkap menurut Kab/Kota, 2010 – 2016

Produksi Perikanan Tangkap (Rp.000)							
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total	223,560,48	503,572,43	504,172,11	379,336,00	378,190,21	65,997,62	61,209,92

Lampiran 13. Data Sentra Produksi Perikanan

Sentra Produksi Perikanan

Perikanan Tangkap

1. Tongkol : Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, Kota Pangkalpinang
2. Tenggiri : Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat dan Kab. Bangka
3. Kerapu : Kab. Belitung, Kota Pangkalpinang, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka dan Kab. Bangka Tengah

Perikanan Budidaya

1. Udang Vaname : Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka
2. Kerapu : Kab. Bangka Selatan, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur
3. Lele : Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur
4. Bandeng : Kab. Bangka Selatan
5. Ikan Hias : Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Belitung Timur
6. Rumput Laut : Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kabupaten Bangka Selatan

Lampiran 14. Data Estimasi potensi Sumberdaya Ikan

Estimasi potensi sumberdaya ikan pada WPP 711 – Laut Cina Selatan

(dalam ribu Ton/Tahun)

Kelompok Sumberdaya Ikan	Laut Cina Selatan
	WPP 711
Ikan Pelagis Besar	66.1
Ikan Pelagis Kecil	621.5
Ikan Demersal	334.8
Udang Penaeid	11.9
Ikan Karang Konsumsi	21.6
Lobster	0.4
Cumi-cumi	2.7
Total Potensi (1.000 ton/tahun)	1,059.0

Lampiran 15. Data Nilai Tukar Nelayan

Data Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan di pedesaan. NTN juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk perikanan tangkap dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTN, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan.

Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Tahun	Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2012	89,73
2013	91,44
2014	102,98
2015	101,44
2016	107,75